

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

— Provinsi Aceh
2023





INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

— Provinsi Aceh
2023



<https://aceh.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI ACEH 2023

ISSN : 2477-4650
Nomor Publikasi : 11000.24016
Katalog BPS : 4102002.11
Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm
Jumlah Halaman : xix + 60 halaman

Naskah

PJK Analisis Statistik Lintas Sektor
Tim Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Penyelaras Akhir

PJK Analisis Statistik Lintas Sektor
Tim Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit

PJK Analisis Statistik Lintas Sektor
Tim Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan oleh

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau mengandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://aceh.bps.go.id>

TIM PENYUSUN

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI ACEH 2023

Pengarah

Dr. Ahmadriswan Nasution, S.Si, M.T.

Penanggung Jawab

Meita Jumiartanti, S.ST, M.Si

Penyunting

Meita Jumiartanti, S.ST, M.Si

Pengolah Data dan Penulis Naskah

Dr. Azwar, M.Si

Penata Letak

Hendra Darmawan, S.ST, M.Si

Perancang Sampul

Hendra Darmawan, S.ST, M.Si

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://aceh.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indeks ini dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan penghidupan yang layak. Indikator- indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Penyajian angka IPM dilakukan mulai dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Penyajian IPM menurut provinsi dan kabupaten/kota bertujuan untuk memetakan pembangunan manusia baik pencapaian, posisi, maupun disparitas antardaerah. Diharapkan setiap daerah kabupaten/kota berupaya meningkatkan kinerja pembangunan melalui peningkatan kapasitas dasar penduduk dan pembangunan manusianya.

IPM Aceh dari tahun 2010 hingga 2023 menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Namun demikian, pencapaian dan kemajuan tersebut masih memerlukan perhatian yang serius disebabkan masih tingginya disparitas pencapaian pembangunan antarkabupaten/kota.

Publikasi IPM Provinsi Aceh 2023 mendeskripsikan capaian IPM Provinsi Aceh sejak tahun 2010 hingga 2023. Penyajian data dan analisis yang tercakup di dalamnya bertujuan memberi gambaran kondisi pembangunan manusia Provinsi Aceh sampai ke lingkup kabupaten/kota.

Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan yang berkepentingan, termasuk masyarakat pengguna sebagai bahan rujukan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan publikasi ini.

Banda Aceh, Mei 2024

**Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Aceh**



Dr. Ahmadriswan Nasution, S.Si., M.T.

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://aceh.bps.go.id>

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ide dasar dari konsep pembangunan manusia pada intinya adalah menciptakan pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, lingkungan, dan perubahan dalam kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, manusia harus diposisikan sebagai kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Dengan berbekal konsep ini, tujuan utama dari pembangunan manusia harus mampu menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (*Human Development Report 1990*).

Konsep pembangunan manusia diukur dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar manusia, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita. Ketiga dimensi ini terangkum dalam suatu indeks komposit yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

United Nations Development Programme (UNDP) memperkenalkan IPM pertama kali pada tahun 1990. Hingga tahun 2023, *UNDP* telah beberapa kali melakukan revisi metode penghitungan IPM. Revisi yang cukup besar dilakukan pada tahun 2010 yang disebut dengan era baru pembangunan manusia. *UNDP* memperkenalkan dua indikator baru yang sekaligus menggantikan dua indikator metode lama. Indikator harapan lama sekolah menggantikan indikator melek huruf, sementara Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita menggantikan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.

Di Indonesia, IPM mulai dihitung pada tahun 1996. Sejak saat itu, IPM dihitung secara berkala setiap tiga tahun. Sejak tahun 2004, IPM dihitung setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan Kementerian Keuangan dalam menghitung Dana Alokasi Umum (DAU). Indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM di Aceh sampai saat ini mengacu pada metode baru yang diterapkan oleh UNDP dengan beberapa penyesuaian. Indikator pengeluaran per kapita tetap digunakan dalam penghitungan. Metode baru diaplikasikan di Indonesia sejak tahun 2014 dengan angka backcasting dari tahun 2010.

Badan Pusat Statistik mencatat IPM Provinsi Aceh pada tahun 2023 mencapai 74,70, meningkat sebesar 0,59 poin dari tahun sebelumnya. Sejak tahun 2016, Aceh telah menempatkan diri sebagai wilayah dengan status pembangunan manusia “tinggi”. Status ini merupakan babak baru dalam pembangunan kualitas manusia khususnya di Provinsi Aceh. Umur Harapan Hidup saat lahir di Aceh saat ini mencapai

73,06 tahun. Hal ini berarti bahwa bayi yang baru lahir pada tahun 2023 diharapkan dapat bertahan hidup hingga usia 73,06 tahun. Secara rata-rata, penduduk Aceh usia 25 tahun ke atas sudah menempuh 9,55 tahun masa sekolah atau setara kelas 1 (semester 2) SMA. Selain itu, rata-rata penduduk usia 7 tahun yang mulai bersekolah diharapkan dapat mengenyam pendidikan hingga 14,38 tahun, setara dengan D-II atau memasuki semester V pada jenjang pendidikan Strata I. Tidak kalah penting, standar hidup layak yang diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan mencapai Rp 10,334 juta per kapita per tahun, mengalami peningkatan dibanding 2022 tercatat Rp 9,963 juta.

Secara umum, kualitas manusia di masing-masing kabupaten/kota di Aceh yang diukur melalui IPM menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, sama halnya dengan agregat IPM Aceh. Semenjak tahun 2013, sudah tidak ada lagi kabupaten/kota di Aceh dengan status pembangunan manusia tergolong “rendah”. Pada tahun 2023, terdapat 1 kabupaten/kota yang berubah status dari kategori “sedang” ke “tinggi.” Dengan demikian pada tahun 2023 kabupaten/kota yang masuk kategori tinggi mencapai 18 kabupaten/kota, sedang 2 kabupaten/kota, sedangkan sangat tinggi bertambah menjadi dua dari sebelumnya kota Banda Aceh, yaitu Langsa dan kota Lhokseumawe.

Dalam kurun waktu 2011 hingga 2023, pembangunan manusia di Aceh menunjukkan perkembangan yang terus meningkat. Kapabilitas dasar juga berhasil ditingkatkan tetapi dengan beberapa tantangan yang masih harus dihadapi di masa mendatang. Dalam bidang pendidikan, partisipasi pendidikan di setiap jenjangnya cenderung meningkat untuk melanjutkan ke jenjang SLTP dan SLTA. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa putus sekolah masih ada, tercatat angka partisipasi sekolah (APS) untuk SLTP 97,72 persen, bermakna masih ada 2,28 persen belum mencapai target pemerintah dalam program wajib belajar sembilan tahun. Demikian juga halnya dengan tingkat SLTA tercatat APS sebesar 83,41 persen menunjukkan bahwa terdapat 16,59 persen belum dapat melanjutkan ke jenjang SLTA. Dalam bidang kesehatan, status kesehatan dan kualitas lingkungan tempat tinggal penduduk Aceh cenderung meningkat dengan semakin meningkatnya umur harapan hidup penduduk.

DAFTAR SINGKATAN

ABH	Angka Buta Huruf
APM	Angka Partisipasi Murni
APS	Angka Partisipasi Sekolah
ASEAN	Association of South East Asian Nations
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
GNP	Gross National Product
HDI	Human Development Index
HLS	Harapan Lama Sekolah
HDR	Human Development Report
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
SDG's	Sustainable Development Goals
MYS	Mean Years of Schooling
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
PJP	Pembangunan Jangka Panjang
Podes	Potensi Desa
PPP	Purchasing Power Parity
RLS	Rata-rata Lama Sekolah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SD	Sekolah Dasar
SLTA	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SLTP	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
UHH	Umur Harapan Hidup
UNDP	United Nations Development Programme
UUD	Undang-Undang Dasar

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://aceh.bps.go.id>

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
DAFTAR SINGKATAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
BAB 2 PENCAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI ACEH	5
2.1 Gambaran Pencapaian Pembangunan Manusia Provinsi Aceh.....	7
2.2 Gambaran Capaian Pembangunan Manusia Level Kabupaten/Kota	12
BAB 3 PENINGKATAN KAPABILITAS DASAR MANUSIA.....	19
3.1 Capaian dan Tantangan Bidang Pendidikan.....	21
3.2 Capaian dan Tantangan Bidang Kesehatan.....	24
3.3 Capaian dan Tantangan di Bidang Sosial Ekonomi	28
BAB 4 DISPARITAS PENCAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA ACEH	31
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN	41
Catatan Teknis.....	49

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://aceh.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Hal
2.1	IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2012-2019 dan 2020-2023	13
2.2	Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Status Pencapaian IPM, 2018, 2021, 2023	15
2.3	Tiga Kabupaten/Kota dengan IPM Tertinggi, 2011-2023	16
2.4	Tiga Kabupaten/Kota dengan IPM Terendah, 2011-2023	16
3.1	Disparitas Angka Partisipasi Sekolah antarkabupaten/kota, 2021-2023	22

<https://aceh.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://aceh.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Hal
2.1	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Aceh (UHH SP2020LF), 2020-2023	7
2.2	Pertumbuhan IPM Provinsi Aceh, 2011-2023	8
2.3	Umur Harapan Hidup Provinsi Aceh, 2010-2023.....	9
2.4	Harapan Lama Sekolah Provinsi Aceh, 2010-2023	10
2.5	Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Aceh, 2010-2023	11
2.6	Pengeluaran Per kapita Per Tahun Provinsi Aceh, 2010-2023.....	12
3.1	Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Aceh, 2013-2023	21
3.2	Angka Kesakitan Penduduk Aceh, 2010-2023	24
3.3	Persentase Penduduk Aceh Menurut Tempat/Cara Berobat Jalan, 2023	25
3.4	Beberapa Indikator Sanitasi dan Rumah Sehat Provinsi Aceh, 2022-2023	26
3.5	Persentase Persalinan Ditolong Tenaga Medis di Provinsi Aceh, 2010-2023	27
3.6	Tren Kemiskinan Provinsi Aceh, 2010-2023 (Maret)	28
3.7	Tren Gini Rasio Provinsi Aceh, 2010-2023.....	29
3.8	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Aceh, 2010-2023	30
4.1	Disparitas Pembangunan Manusia antarkabupaten di Provinsi Aceh, 2011-2023 ..	33
4.2	Disparitas Umur Harapan Hidup antarkabupaten di Provinsi Aceh, 2011-2023.....	34
4.3	Disparitas Harapan Lama Sekolah antarKabupaten di Provinsi Aceh, 2011-2023 ...	35
4.4	Disparitas Rata-Rata Lama Sekolah antarkabupaten di Provinsi Aceh, 2011-2023 .	36
4.5	Disparitas Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan antarkabupaten di Provinsi Aceh, 2011-2023.....	37
4.6	Disparitas Pertumbuhan IPM antarkabupaten/kota di Provinsi Aceh, 2021-2023..	37

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://aceh.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran	Hal
1	Umur Harapan Hidup Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota, 2012-2023.....	43
2	Harapan Lama Sekolah Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota, 2011-2023	44
3	Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota, 2012-2023	45
4	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota, 2012-2023.....	46
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota, 2012-2023.....	47

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://aceh.bps.go.id>

1

PENDAHULUAN

Organisasi internasional yang menangani pembangunan manusia di PBB yaitu *UNDP (United Nation Development Programme)* mendeklarasikan bahwa pentingnya pembangunan yang berpusat pada manusia, memposisikan manusia bukan sebagai alat pembangunan, tapi sebagai tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri.

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://aceh.bps.go.id>

PENDAHULUAN

Ide dasar pembangunan manusia adalah untuk memenuhi tujuan utama pemerintah Indonesia dalam mencapai pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Perwujudan gagasan pembangunan manusia adalah dengan memfokuskan perhatian pembangunan nasional Indonesia pada manusia sebagai titik sentral yang bercorak dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tidak dapat dipungkiri, rakyat harus diikutsertakan dalam seluruh proses pembangunan. Artinya, rakyat bukan hanya sebagai alat untuk mencapai hasil akhir pembangunan tetapi sebagai tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri.

Untuk memenuhi hal tersebut, yaitu dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan tentunya dibutuhkan masyarakat Indonesia yang unggul dari segi kuantitas serta maju dari segi kualitas. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya serius dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia, baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (berdaya beli), maupun aspek moralitas (iman dan takwa). Seluruh upaya pemerintah tersebut merupakan prasyarat penting untuk mencapai masyarakat Indonesia yang berkualitas.

Di era sebelum 1970-an, tingkat pertumbuhan GNP, baik secara keseluruhan maupun per kapita, menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan. Kenyataannya, meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dicapai oleh negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) namun taraf hidup penduduknya tidak ikut meningkat. Oleh karena itu, para pakar merumuskan konsep baru dalam mengukur pembangunan suatu negara yang berorientasi pada manusia. Konsep ini mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara tidak hanya ditandai oleh tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi tetapi mencakup pula kualitas manusianya. Inilah tantangan yang harus dihadapi, yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi mampu dirasakan seluruh lapisan masyarakat dan mampu meningkatkan kualitas mereka sebagai manusia.

Dalam menghadapi perdagangan bebas, diperlukan iklim investasi yang kondusif serta peningkatan kualitas manusia sebagai bangsa Indonesia yang bersaing di era globalisasi. Regulasi pembangunan yang memegang teguh prinsip dan konsep pembangunan manusia mutlak diperlukan dimana manusia ditempatkan sebagai tujuan akhir pembangunan. Cara pandang yang lebih luas ini memungkinkan pemerintah dapat memenuhi hak-hak warga negara serta dapat menjamin pertumbuhan ekonomi yang kuat dan mantap dalam jangka panjang.

Pendahuluan

Sejak tahun 1990, IPM menjadi salah satu indikator yang mencerminkan progres kemajuan suatu bangsa, seperti yang dinyatakan dalam laporan yang dirilis oleh UNDP. Dalam laporan tersebut, tercakup 187 negara yang sudah terukur capaian IPM beserta semua komponen pembentuknya. Secara internasional, terdapat pembagian kelompok negara-negara berdasarkan nilai IPM, yaitu sangat tinggi, tinggi, menengah, dan rendah.

Perspektif baru yang dibangun oleh dunia internasional adalah kaitan pembangunan manusia dengan aspek kerentanan. Masyarakat dengan pembangunan manusia yang lebih tinggi terutama dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik lebih tahan banting dibandingkan dengan mereka yang kekurangan gizi dan rendah pendidikannya. Sehingga masyarakat yang rentan ini akan menghadapi kesulitan dalam mengubah nasibnya ketika terjadi guncangan maupun bencana. Pendekatan berbasis resiko akan merekomendasikan kebijakan-kebijakan dalam hal pengelolaan resiko. Sama pentingnya dengan pendekatan pembangunan manusia yang membentuk kekuatan individu maupun masyarakat dalam upaya mengurangi kerentanan dan membangun ketahanan secara sosial maupun ekonomi.

Tinggi rendahnya nilai IPM tidak dapat dilepaskan dari program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Namun perlu disadari, perubahan atau peningkatan angka IPM tidak bisa terjadi secara instan. Pembangunan manusia merupakan sebuah proses dan tidak bisa diukur dalam waktu singkat. Berbeda dengan pembangunan ekonomi pada umumnya, hasil pembangunan pendidikan dan kesehatan tidak bisa dilihat dalam jangka pendek.

Untuk itu, dalam rangka melihat kemajuan pembangunan, publikasi ini dilengkapi dengan analisis mengenai capaian dan kemajuan IPM dan komponen IPM pada tahun 2010-2023. Data IPM secara lengkap pada tahun 2010-2023 dapat dilihat pada tabel lampiran. Pada publikasi ini akan dianalisis mengenai capaian IPM Provinsi Aceh dan disparitasnya pada level kabupaten/kota.

Secara khusus, publikasi ini menyajikan:

- 1) Pencapaian pembangunan manusia di Provinsi Aceh;
- 2) Analisis peningkatan kapabilitas dasar pembangunan manusia di Provinsi Aceh;
- 3) Analisis disparitas capaian IPM dan komponennya level kabupaten/kota;
- 4) Analisis disparitas IPM antarkabupaten/kota.

2

PENCAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI ACEH

Pembangunan manusia Aceh terus membaik dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari IPM dan komponennya yang meningkat dari tahun 2010 hingga 2023.

Demikian pula dengan pembangunan manusia kabupaten/kota di Aceh.

Selama periode 2010-2023 terjadi peningkatan IPM pada level kabupaten/kota.

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://aceh.bps.go.id>

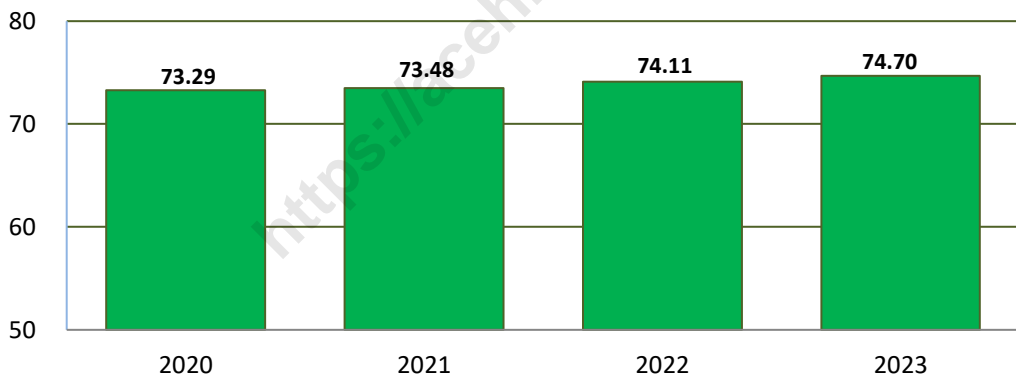
PENCAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI ACEH

2.1 Gambaran Pencapaian Pembangunan Manusia Provinsi Aceh

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia.

Pembangunan manusia di Provinsi Aceh terus mengalami perbaikan, terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia yang terus meningkat sejak tahun 2020 hingga 2023 (lihat Gambar 2.1). IPM Aceh mengalami kenaikan sebesar 1,41 poin periode 2020 hingga 2023. Capaian IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun merupakan sinyal positif bahwa kualitas manusia di Aceh semakin membaik dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Gambar 2.1 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Aceh (UHH SP2020LF), 2020-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

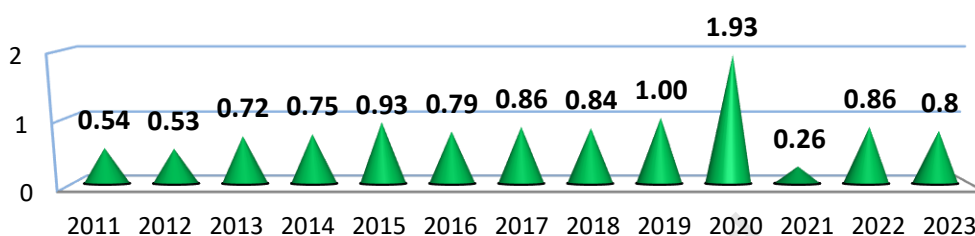
Pembagian kategori IPM untuk membedakan capaian antarwilayah dikelompokkan menjadi: kategori sangat tinggi ($IPM \geq 80$), kategori tinggi ($70 \leq IPM < 80$), kategori sedang ($60 \leq IPM < 70$), dan kategori rendah ($IPM < 60$). Sejak tahun 2010, IPM Aceh berada pada kategori sedang, sedangkan mulai pada tahun 2016 hingga 2023, IPM sudah berada pada kategori tinggi.

Pergerakan perubahan IPM dari tahun ke tahun juga dinilai sebagai gambaran perubahan pembangunan manusia di suatu wilayah. Hal ini adalah indikator untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu periode waktu. Pertumbuhan IPM tersebut perlu dikaji karena keberhasilan pembangunan manusia tidak hanya diukur

Pencapaian Pembangunan Manusia Provinsi Aceh

dari tingginya capaian angka IPM pada satu waktu, akan tetapi juga melihat kecepatan dalam peningkatan IPM-nya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM-nya maka semakin cepat nilai IPM yang ideal akan tercapai.

Gambar 2.2 Pertumbuhan IPM Provinsi Aceh, 2011-2023 (dalam persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2.2 menampilkan pertumbuhan IPM Aceh setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, meskipun terjadi fluktuasi untuk tahun 2016, 2018, dan 2021. Sejak tahun 2011 – 2023, pertumbuhan IPM memperlihatkan pergerakan yang cukup baik. Pada tahun 2011, IPM Aceh tumbuh 0,54 persen dibandingkan IPM tahun 2010. Angka yang sama ditunjukkan kembali pada pertumbuhan IPM 2012 terhadap capaian IPM Aceh tahun 2011, yaitu 0,53 persen. Kondisi terkini, IPM Aceh tahun 2023 tumbuh sebesar 0,80 persen dibandingkan tahun 2023.

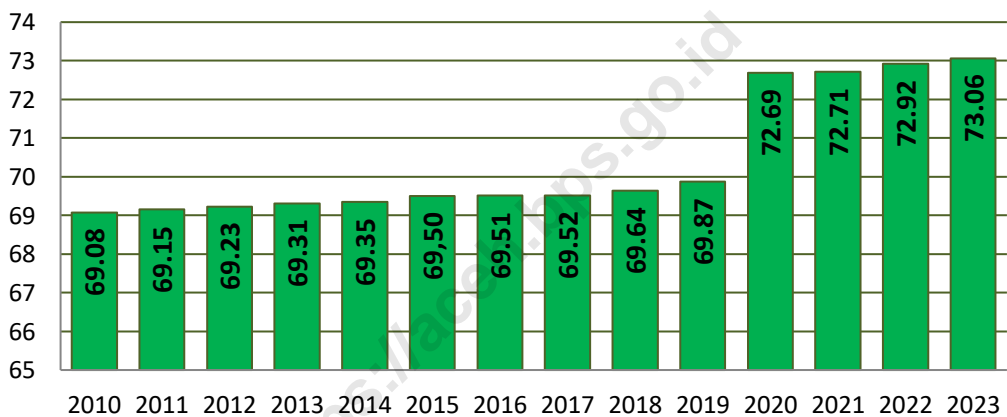
Dalam perhitungan IPM, tiga komponen utama dalam pengukuran capaian pembangunan manusia, sesuai dengan rekomendasi *UNDP*, adalah dimensi umur dan kesehatan (Umur Harapan Hidup), dimensi pengetahuan (Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah), dan dimensi standar hidup layak (Pengeluaran Per Kapita). Dengan menggunakan rata-rata geometrik, ketiga dimensi membentuk IPM dengan keseimbangan peningkatan di masing-masing dimensi.

Dimensi yang pertama, Umur Harapan Hidup (UHH) adalah indikator yang menggambarkan aspek kesehatan, yaitu perkiraan lama hidup rata-rata penduduk (dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas). Semakin tinggi capaian indikator UHH, semakin tinggi kemampuan manusia di suatu wilayah tertentu untuk hidup lebih lama.

Di Provinsi Aceh, indikator ini menunjukkan tren peningkatan selama tahun 2010 – 2019. UHH Aceh tahun 2010 sebesar 69,08 tahun, artinya bayi yang lahir di Aceh

pada tahun 2010 akan bertahan hidup hingga usia 69 tahun 1 bulan. Mulai tahun 2020 hingga seterusnya, UHH yang digunakan adalah hasil sensus penduduk 2020 lanjutan (SP2020LF) tercatat sebesar 72,69 tahun. Pada tahun 2023 UHH Aceh mencapai 73,06 tahun, artinya bayi yang lahir di Aceh tahun 2023 berpeluang hidup hingga usia 73 tahun. Hal ini menandakan bahwa semakin membaiknya derajat kesehatan masyarakat di Aceh karena UHH merupakan salah satu indikator tingkat kesehatan masyarakat. Umur Harapan Hidup masyarakat di Provinsi Aceh menunjukkan peningkatan, namun capaian tersebut masih di bawah angka nasional yang pada tahun 2023 mencapai 73,93 tahun.

Gambar 2.3 Umur Harapan Hidup Provinsi Aceh, 2010-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik

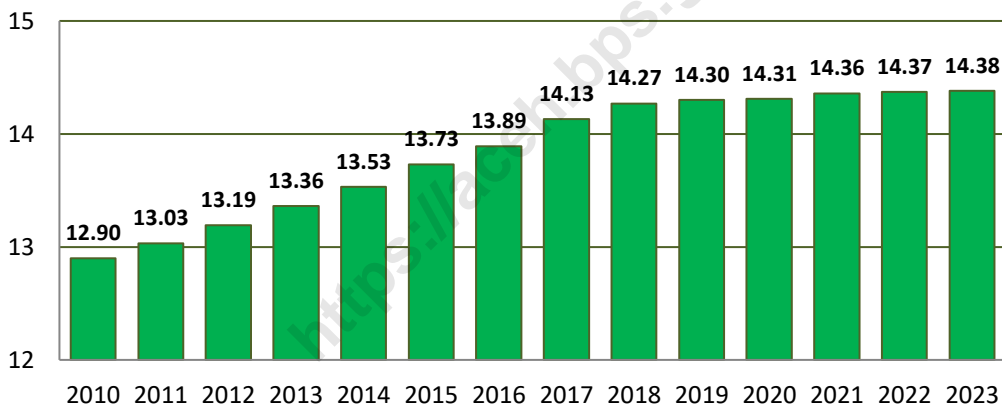
Dalam kesinambungan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, sumber daya manusia yang sehat adalah investasi yang vital. Perwujudan pemerataan pembangunan fasilitas kesehatan sampai ke tingkat kecamatan dan daerah terpencil dicapai dengan adanya jaminan kecukupan jumlah tenaga kesehatan berbanding dengan jumlah penduduk yang perlu penanganan kesehatan. Pemerintah wajib proaktif menyerukan budaya dan kebiasaan hidup sehat agar peningkatan kualitas manusia dari dimensi ini tidak hanya sekedar angka dalam indikator, namun terwujudkan secara riil dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Dimensi kedua yang menjadi pembentuk indeks pembangunan manusia adalah aspek pendidikan. Dalam penghitungannya, aspek ini dibentuk oleh agregat dari indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan lama sekolah dihitung dari jumlah penduduk usia 7 tahun ke atas yang bersekolah sampai dengan jenjang tertentu menurut kelompok umur yang disesuaikan dengan program

wajib belajar 9 tahun. Dalam indikator ini tidak mencakup anak yang mulai sekolah pada usia di bawah 6 tahun.

Harapan lama sekolah Aceh pada tahun 2010 adalah 12,90 tahun. Maksudnya adalah seorang yang berusia 7 tahun pada tahun 2010 mempunyai peluang untuk bersekolah selama 12,90 tahun atau sampai jenjang perkuliahan di tahun pertama (dengan asumsi lama sekolah 12 tahun telah menamatkan sekolah menengah atas). Capaian HLS Aceh hingga tahun 2023 terus meningkat dan mencapai angka 14,38 tahun. Ketika angka ini terpenuhi, harapan lama sekolah penduduk berusia 7 tahun ke atas di Provinsi Aceh pada tahun 2023 berada pada tahun ketiga (semester 5) pada jenjang perguruan tinggi. Faktanya, HLS Aceh tahun 2023 lebih tinggi dari capaian rata-rata nasional untuk indikator Harapan Lama Sekolah (HLS nasional tahun 2023 sebesar 13,15 tahun).

Gambar 2.4 Harapan Lama Sekolah Provinsi Aceh, 2010-2023



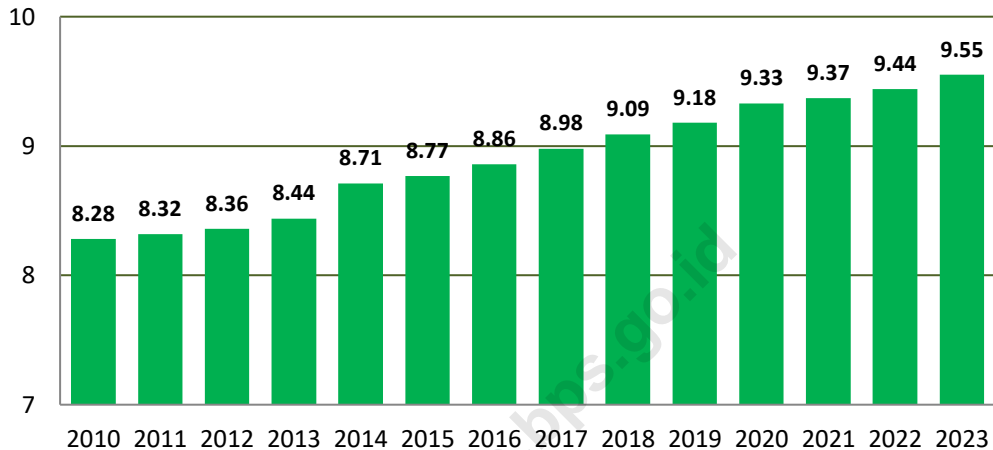
Sumber: Badan Pusat Statistik

Selain HLS, komponen pendidikan lainnya yang digunakan untuk penghitungan IPM adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). RLS adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (dengan asumsi pada saat berusia 25 tahun proses pendidikan seseorang sudah berakhir). Indikator ini merupakan penghitungan dari kombinasi angka partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang pernah dimiliki dan tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki.

Sama seperti HLS, RLS dari tahun ke tahun terus meningkat. Seperti ditampilkan pada Gambar 2.5, pada tahun 2010 penduduk Aceh yang berumur 25 tahun ke atas rata-rata bersekolah sampai dengan kelas 3 SMP (belum tamat) atau telah mengenyam pendidikan selama 8,28 tahun. Angka ini terus meningkat hingga ke tahun 2023 yang

mencapai 9,44. Artinya bahwa hingga tahun 2022 penduduk Aceh yang berumur 25 tahun ke atas, rata-rata bersekolahnya sampai dengan kelas 1 SMA, atau telah mengenyam pendidikan selama 9,55 tahun.

Gambar 2.5 Rata rata Lama Sekolah Provinsi Aceh, 2010-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik

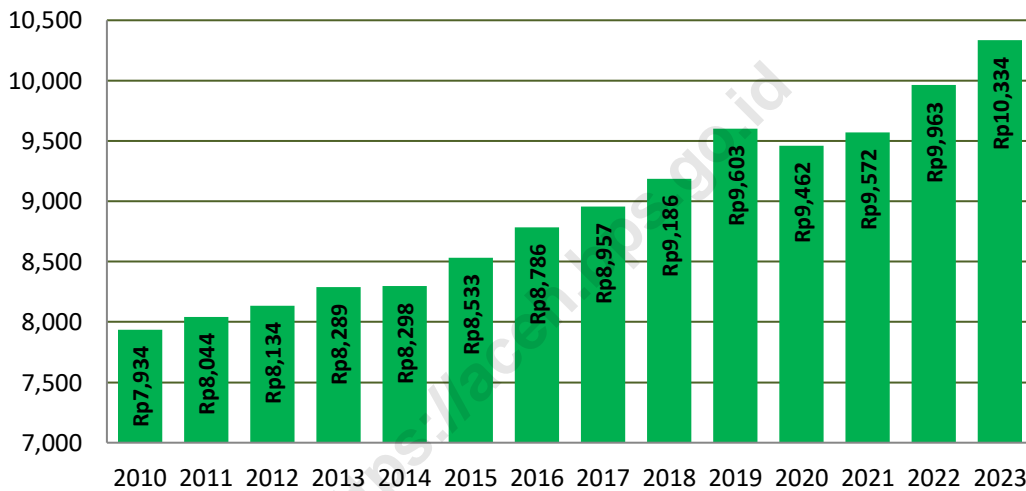
Dibandingkan dengan angka RLS nasional, capaian Provinsi Aceh pada komponen IPM tahun 2023 lebih tinggi dari rata-rata 34 provinsi. RLS nasional tahun 2023 tercatat sebesar 8,77 tahun, bermakna secara nasional masih belum memenuhi atau kurang dari 9 tahun sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah dalam program wajib belajar sembilan tahun. Sedangkan di Aceh, RLS sudah mencapai angka 9,55 tahun, namun sarana pendukung dunia pendidikan seperti tenaga pendidik dan siswa secara kualitas masih harus diperbaiki dan ditingkatkan agar mampu bersaing secara nasional.

Aspek terakhir yang membentuk IPM adalah indikator yang menggambarkan kualitas hidup manusia dari standar hidup layak. Indikator pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan (*Purchasing Power Parity*) menunjukkan kemampuan (daya beli) masyarakat dalam membelanjakan uangnya untuk konsumsi barang maupun jasa. Perubahan kondisi perekonomian akan secara nyata ikut merubah pola konsumsi masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa komponen ini cukup sensitif.

Indikator pengeluaran per kapita dalam IPM mencakup 96 komoditas, terdiri dari 60 komoditas makanan dan 36 komoditas nonmakanan. Sumber data utama dari komponen ini adalah hasil pencacahan susenas yang menghasilkan rata-rata pengeluaran per kapita selama setahun, dari level provinsi hingga kabupaten/kota. Selama periode 2010-2019, pengeluaran per kapita penduduk Aceh setiap tahunnya

mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan karena dampak dari covid-19. Pada Tahun 2019, pengeluaran per kapita Aceh tercatat sebesar 9,603 juta rupiah, sementara tahun 2020 sedikit menurun menjadi 9,492 juta rupiah karena pengaruh covid-19 yang melanda hampir seluruh daerah Indonesia dengan berbagai tingkatan keparahan. Namun demikian pada tahun 2021 hingga 2023, indikator ini mengalami peningkatan. Gambar 2.6 menampilkan perubahan komponen pengeluaran per kapita per tahun masyarakat Aceh selama tahun 2010-2023.

Gambar 2.6 Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Provinsi Aceh, 2010-2023 (ribu)



Sumber: Badan Pusat Statistik

2.2 Gambaran Capaian Pembangunan Manusia Level Kabupaten/Kota

Sebanyak 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh memiliki keberagaman baik dari segi potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Hal ini menyebabkan capaian pembangunan manusia berbeda pada setiap daerah. Faktor-faktor penentu keberhasilan capaian pembangunan ditentukan dari program-program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Di samping sebagai upaya pengawasan dan evaluasi terhadap program-program pembangunan untuk mempercepat peningkatan pembangunan manusia.

Secara umum, kualitas manusia di masing-masing kabupaten/kota di Aceh yang diukur melalui IPM terlihat menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, sama halnya dengan agregat IPM Aceh. Daerah-daerah dengan IPM yang relatif tinggi mampu mempertahankan prestasinya (meskipun ada yang naik-turun peringkatnya), sementara

daerah yang masih lebih rendah semakin terpacu untuk meningkatkan kapabilitas manusia di masing-masing komponen pembentuknya.

Tabel 2.1 IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2012-2019 dan 2020-2023 (UHHSP2020LF)

Propinsi/Kabupaten/Kota	IPM											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	67,81	68,30	68,81	69,45	70,00	70,60	71,19	71,90	73,29	73,48	74,11	74,70
01. Simeulue	61,25	61,68	62,18	63,16	63,82	64,41	64,74	65,70	67,90	68,29	69,17	69,98
02. Aceh Singkil	64,23	64,87	65,27	66,05	66,96	67,37	68,02	68,91	69,92	70,21	70,61	71,14
03. Aceh Selatan	61,69	62,27	62,35	63,28	64,13	65,03	65,92	66,90	69,79	70,12	70,56	71,14
04. Aceh Tenggara	64,99	65,55	65,90	66,77	67,48	68,09	68,67	69,36	71,21	71,28	72,18	72,93
05. Aceh Timur	62,93	63,27	63,57	64,55	65,42	66,32	66,82	67,39	69,02	69,22	70,13	70,73
06. Aceh Tengah	70,18	70,51	70,96	71,51	72,04	72,19	72,64	73,14	75,07	75,20	75,79	76,45
07. Aceh Barat	66,66	66,86	67,31	68,41	69,26	70,20	70,47	71,22	73,11	73,41	74,09	74,62
08. Aceh Besar	70,10	70,61	71,06	71,70	71,75	72,00	72,73	73,55	75,00	75,03	75,44	75,98
09. Pidie	67,30	67,59	67,87	68,68	69,06	69,52	69,93	70,41	71,92	71,99	72,49	72,95
10. Bireuen	67,57	68,23	68,71	69,77	70,21	71,11	71,37	72,27	73,22	73,27	74,10	74,56
11. Aceh Utara	64,82	65,36	65,93	66,85	67,19	67,67	68,36	69,22	70,95	71,08	71,85	72,50
12. Aceh Barat Daya	62,15	62,62	63,08	63,77	64,57	65,09	65,67	66,56	69,12	69,37	69,79	70,47
13. Gayo Lues	62,85	63,22	63,34	63,67	64,26	65,01	65,88	66,87	69,06	69,42	70,12	70,82
14. Aceh Tamiang	65,21	65,56	66,09	67,03	67,41	67,99	68,45	69,23	70,87	71,12	72,08	73,02
15. Nagan Raya	64,91	65,23	65,58	66,73	67,32	67,78	68,15	69,11	70,54	70,67	71,46	72,15
16. Aceh Jaya	66,42	66,92	67,30	67,53	67,70	68,07	68,83	69,74	71,30	71,39	71,92	72,44
17. Bener Meriah	69,14	69,74	70,00	70,62	71,42	71,89	72,14	72,97	74,54	74,84	75,46	76,06
18. Pidie Jaya	68,90	69,26	69,89	70,49	71,13	71,73	72,12	72,87	74,44	74,84	75,59	76,04
71. Banda Aceh	81,30	81,84	82,22	83,25	83,73	83,95	84,37	85,07	87,06	87,36	87,92	88,32
72. Sabang	70,84	71,07	71,50	72,51	73,36	74,10	74,82	75,77	76,96	77,29	78,03	78,70
73. Langsa	72,75	73,40	73,81	74,74	75,41	75,89	76,34	77,16	79,30	79,58	79,96	80,50
74. Lhokseumawe	73,55	74,13	74,44	75,11	75,78	76,34	76,62	77,30	78,65	78,92	79,38	80,26
75. Subulussalam	59,76	60,11	60,39	61,32	62,18	62,88	63,48	64,46	67,39	67,75	68,72	69,66

Sumber: Badan Pusat Statistik

Kota Banda Aceh sebagai ibukota provinsi, selama tahun 2011-2023 selalu menempati posisi tertinggi untuk angka IPM di Provinsi Aceh. Hal ini karena

ketersediaan berbagai fasilitas dan sarana kesehatan, akses pendidikan, dan aktivitas perekonomian yang lebih menggeliat di Kota Banda Aceh. Potensi inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong tingginya capaian pembangunan manusia Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil penghitungan, IPM Banda Aceh telah masuk dalam kategori sangat tinggi ($IPM \geq 80$) sejak tahun 2010 hingga tahun 2023. Jika dilihat lebih rinci, komponen IPM Kota Banda Aceh pada tahun 2023 mencapai peringkat tertinggi adalah harapan lama sekolah mencapai 17,93 tahun (jenjang S-2 semester 4), rata-rata lama sekolah 13,04 tahun (semester 3 pada jenjang pendidikan perguruan tinggi) dan pengeluaran per kapita per tahun penduduknya mencapai 17,521 juta rupiah.

Di bawah peringkat Kota Banda Aceh adalah Kota Langsa dan Kota Lhokseumawe. Kedua daerah ini sejak tahun 2020-2023 bertahan menduduki peringkat 2 dan 3 dalam capaian IPM. Unsur-unsur penunjang dalam berbagai aktivitas sosial ekonomi yang telah dibangun di kedua kota ini seperti bangunan sekolah, rumah sakit, dan sektor penunjang perekonomian masyarakat seperti perdagangan dan jasa-jasa lainnya telah berkembang dengan pesat. Sementara itu, kabupaten/kota lainnya yang termasuk ke dalam peringkat 10 besar IPM pada tahun 2023 adalah: Kota Sabang, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bireuen, dan Kabupaten Aceh Barat.

Di peringkat menengah ke bawah, yaitu dari 11 sampai dengan 15, pada tahun 2023 ditempati oleh Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh Utara, dan Kabupaten Aceh Jaya. Dari kelima daerah tersebut, tercermin dari Umur Harapan Hidup yang berkisar antara 69,88 tahun hingga 73,63 tahun. Dari segi pendidikan, kelima daerah dengan IPM menengah ini tercatat dengan harapan lama sekolah sekitar 14,02 hingga 14,74 tahun dan rata-rata lama bersekolahnya berkisar sekitar 8,74 sampai 10,09 tahun (kelas 3 SMP – kelas 1 SMA). Sementara besaran pengeluaran per kapita per tahun di kelima kabupaten ini adalah sekitar 8,556 – 10,584 juta rupiah.

Daerah-daerah yang peringkat pembangunannya relatif rendah adalah kabupaten Gayo Lues, Aceh Timur, Aceh Barat Daya, Simeulue, dan Kota Subulussalam. Kelima daerah ini menempati peringkat 19 hingga 23 pada Tahun 2023. Pada tahun tersebut, capaian UHH penduduk pada wilayah tersebut berkisar antara 69,57 – 72,13 tahun, HLS penduduk usia di atas 7 tahun berkisar 13,07 – 15,06 tahun, dan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas antara 8,32 – 9,81 tahun (kelas 3 SLTP-kelas 1 SMA), dan pengeluaran per kapita disesuaikan berkisar antara 7,686 – 9,436 juta rupiah.

Beberapa kabupaten/kota berhasil mempertahankan peringkatnya secara berkesinambungan. Hal ini disebabkan beberapa kabupaten/kota menambah

sarana/prasarana yang dimiliki, seperti gedung perkantoran, sekolah, sarana air bersih, sarana kesehatan, dan lain sebagainya sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian dengan cepat.

Capaian IPM yang menggambarkan keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah diukur berdasarkan status pencapaian IPM kabupaten/kota sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2 Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Status Pencapaian IPM, 2018, 2021, 2023

Kategori		2018	2021	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
Sangat Tinggi	(IPM \geq 80)	1	1	3
Tinggi	(70 \leq IPM < 80)	9	17	18
Sedang	(60 \leq IPM < 70)	13	5	2
Rendah	(IPM < 60)	0	0	0

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pencapaian pembangunan manusia dapat dilihat dengan menghitung jumlah kabupaten/kota yang telah meningkat status pencapaiannya dari kategori sedang ke kategori yang lebih tinggi pada periode tertentu. Semenjak 2013, tidak terdapat lagi kabupaten/kota yang masuk ke dalam kategori IPM rendah (di bawah indeks 60). Kota Banda Aceh, Langsa, dan kota Lhokseumawe menjadi tiga daerah yang status IPM-nya sangat tinggi di Provinsi Aceh pada Tahun 2023. Sungguh membanggakan, pada tahun 2023 terdapat 18 kabupaten/kota berstatus IPM tinggi (indeks antara 70-79) meningkat 1 kabupaten berstatus tinggi dibanding 2021 dan 2 kabupaten/kota berstatus IPM sedang (indeks antara 60-69).

Secara spasial kabupaten/kota di Provinsi Aceh, dapat dibagi menjadi tiga wilayah, yaitu Timur - Utara, Barat-Selatan, dan Tengah - Pedalaman. Letak geografis ini secara tidak langsung juga tercermin dalam pengelompokan capaian peringkat IPM tertinggi dan terendah. Untuk kabupaten/kota yang terletak di wilayah Timur - Utara, sebanyak tiga kabupaten/kota menempati urutan peringkat tiga teratas IPM selama periode 2020-2023, yaitu Kota Banda Aceh, Kota Langsa, dan Kota Lhokseumawe. Sementara dari wilayah tengah-pedalaman hanya dua kabupaten yang berhasil mencapai posisi sepuluh besar, yaitu kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah.

Tabel 2.3 Tiga Kabupaten/Kota dengan IPM Tertinggi, 2011-2023

Kabupaten/ Kota	Tahun										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2021	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Banda Aceh	80,87 (1)	81,30 (1)	81,84 (1)	82,22 (1)	83,25 (1)	83,73 (1)	83,95 (1)	84,37 (1)	85,07 (1)	87,36 (1)	88,32 (1)
Lhokseumawe	72,35 (2)	73,55 (2)	74,13 (2)	74,44 (2)	75,11 (2)	75,78 (2)	76,34 (2)	76,62 (2)	77,30 (2)	78,92 (3)	80,26 (3)
Langsa	72,15 (3)	72,75 (3)	73,40 (3)	73,81 (3)	74,74 (3)	75,41 (3)	75,89 (3)	76,34 (3)	77,16 (3)	79,58 (2)	80,50 (2)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Seperti telah disebutkan, Kota Banda Aceh menempati peringkat pertama capaian IPM selama tahun 2011 – 2023. Sementara itu pada tahun 2023, Kota Langsa, Lhokseumawe, dan Kota dan Sabang menempati posisi 2,3, dan 4. Pada tahun 2023, Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah menempati peringkat lima dan enam.

Pada kelompok peringkat IPM terendah, tiga kabupaten yang menempati posisi ini sejak tahun 2011 hingga 2023. Kabupaten Simeulue dan Kota Subulussalam secara konsisten menempati urutan ke-23 dan 22 selama periode tersebut. Sementara Kabupaten Aceh Barat Daya berada pada urutan 21 pada periode 2018 - 2023. Kesimpulannya adalah tiga kabupaten/kota yang menempati posisi terbawah yang ditampilkan pada Tabel 2.4 merupakan daerah hasil pemekaran wilayah, sehingga pembangunan belum menampakkan hasil secara signifikan dengan program-program pembangunan dari pemerintah setempat.

Tabel 2.4 Tiga Kabupaten/Kota dengan IPM Terendah, 2011-2023

Kabupaten/ Kota	Tahun										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2021	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Aceh Barat Daya	61,75 (20)	62,15 (20)	62,62 (20)	63,08 (20)	63,77 (19)	64,57 (19)	65,09 (19)	65,67 (21)	66,56 (21)	69,37 (21)	70,47 (21)
Simeulue	61,03 (22)	61,25 (22)	61,68 (22)	62,18 (22)	63,16 (22)	63,82 (22)	64,41 (22)	64,74 (22)	65,70 (22)	68,29 (22)	69,98 (22)
Subulussalam	59,34 (23)	59,76 (23)	60,11 (23)	60,39 (23)	61,32 (23)	62,18 (23)	62,88 (23)	63,48 (23)	64,46 (23)	67,75 (23)	69,66 (23)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Secara umum dapat dinyatakan bahwa, pada periode 2011-2023, pencapaian pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Aceh masih relatif bervariasi terlihat dari persebarannya dalam pengelompokan status IPM. Upaya pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi dalam meningkatkan pembangunan manusia di wilayahnya masing-masing masih harus dioptimalkan meskipun telah menampakkan hasil yang baik. Capaian yang baik adalah tidak ada lagi kabupaten/kota yang berstatus IPM rendah sejak tahun 2013. Capaian terbaiknya adalah tiga kota pada tahun 2023 masuk ke IPM berstatus sangat tinggi, yaitu kota Banda Aceh, Langsa, dan kota Lhokseumawe, sebelumnya tahun 2022 hanya kota Banda Aceh saja dengan kategori berstatus sangat tinggi.

<https://aceh.bps.go.id>

Halaman sengaja dikosongkan

<https://aceh.bps.go.id>

3

PENINGKATAN KAPABILITAS DASAR MANUSIA

Fokus peningkatan pembangunan manusia tidak hanya pada komponen penyusun IPM saja, melainkan juga pada indikator-indikator lain yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi peningkatan komponen IPM. Perbaikan di bidang pendidikan dan kesehatan harus dilakukan secara berkesinambungan karena dua aspek tersebut sebagai modal dasar dalam membentuk manusia yang berkualitas

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://acehbps.go.id>

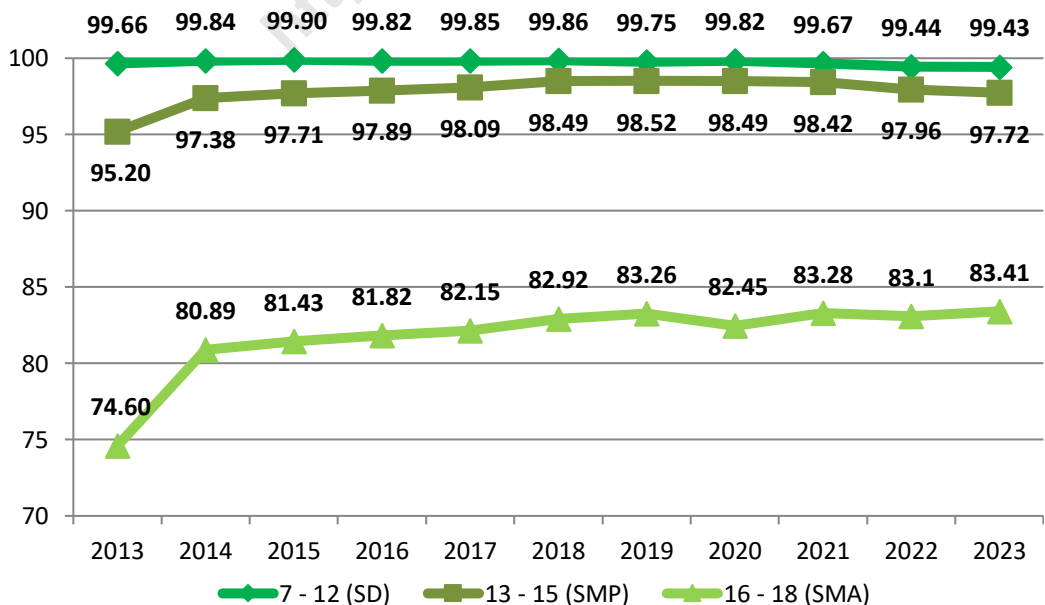
PENINGKATAN KAPABILITAS DASAR MANUSIA

Pembangunan manusia merupakan suatu upaya untuk memperluas pilihan-pilihan yang dimiliki manusia yang dapat terealisasi apabila manusia berumur panjang dan sehat, memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang dapat memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya dalam kegiatan yang produktif. Hal tersebut sekaligus merupakan tujuan utama dari pembangunan yaitu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

3.1 Capaian dan Tantangan Bidang Pendidikan

Cakupan pendidikan formal idealnya mengalami perluasan, sebagai salah satu upaya peningkatan kapabilitas dasar penduduk di bidang pendidikan. Pemerintah telah mengupayakan berbagai program untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Aceh. Di antaranya adalah program untuk memberantas buta aksara, menekan angka putus sekolah melalui pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan beasiswa yatim piatu pemerintah Aceh untuk menjamin kesempatan agar memperoleh pendidikan melalui program penuntasan wajib belajar sembilan tahun.

Gambar 3.1 Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Aceh, 2013-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik

Peningkatan Kapabilitas Dasar Manusia

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator untuk mengukur pemerataan akses terhadap pendidikan. Gambar 3.1 menunjukkan capaian APS pada setiap kelompok umur sekolah di mana capaian APS 7-12 tahun atau usia sekolah dasar merupakan APS yang tertinggi.

Sejak tahun 2015 sampai 2023, APS untuk kelompok 7-12 tahun mencapai 99,90 persen dan 99,43. Angka ini sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2015. Namun demikian, perlu dicermati bahwa belum semua penduduk di Aceh menempuh pendidikan formal sampai lulus sekolah dasar.

Lebih lanjut, APS 13-15 tahun atau usia sekolah menengah pertama, pada periode 2013 - 2019 mengalami peningkatan, kecuali Tahun 2020 - 2023 sedikit mengalami penurunan, meskipun capaiannya lebih rendah dari APS 7-12 tahun. Tercatat hanya 97,72 persen penduduk di Aceh pada 2023 yang berpartisipasi dalam sekolah untuk kelompok umur ini, menurun tipis dari 97,96 persen pada tahun 2022. Capaian ini juga harus menjadi perhatian pemerintah bahwa masih terdapat sekitar 2,28 persen penduduknya yang belum menempuh pendidikan sekolah menengah pertama. Sedangkan untuk usia sekolah 16-18 tahun, tingkat APS tahun 2023 hanya mencapai 83,41 persen. Hal ini bermakna bahwa masih terdapat 16,59 persen penduduk Aceh tidak menamatkan pendidikan sekolah menengah atas.

Tabel 3.1 Disparitas Angka Partisipasi Sekolah Antarkabupaten, 2021-2023

Kelompok Umur	Tahun	Maksimum	Minimum	5 Kab/Kota dengan APS Terendah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7-12 Tahun	2021	Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Singkil (99,97-99,9 persen)	Aceh Tamiang (99,35 persen)	Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Bener Meriah, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya
	2022	Aceh Tamiang (99,99 persen)	Nagan Raya (98,34 persen)	Nagan Raya, Aceh Timur, Aceh Jaya, Bener Meriah, Aceh Besar
	2022	Kota Langsa (99,94 persen)	Nagan Raya (98,43 persen)	Nagan Raya, Aceh Timur, Aceh Besar, Bener Meriah, Sabang

Peningkatan Kapabilitas Dasar Manusia

13-15 Tahun	2021	Langsa (99,67 persen)	Aceh Jaya (96,98 persen)	Aceh Barat Daya, Simeulue, Aceh Jaya, Aceh Singkil, Aceh Tengah
	2022	Aceh Utara (99,81 persen)	Aceh Jaya (93,26 persen)	Aceh Jaya, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Timur, Aceh Singkil.
	2023	Aceh Jaya (99,91 persen)	Aceh Barat Daya (94,26 persen)	Aceh Barat Daya, Pidie Jaya, Pidie, Aceh Singkil.
16-18 Tahun	2021	Sabang (97,88 persen)	Aceh Timur (73,83 persen)	Aceh Timur, Bireuen, Aceh Barat, Aceh Utara, Aceh Tamiang
	2022	Sabang (98,01 persen)	Aceh Timur (65,33 persen)	Aceh Timur, Bener Meriah, Aceh Tenggara, Pidie Jaya, Aceh Selatan
	2023	Banda Aceh (95,75 persen)	Aceh Timur (65,85 persen)	Aceh Timur, Bener Meriah, Aceh Tenggara, Pidie Jaya, Aceh Selatan

Sumber: Badan Pusat Statistik

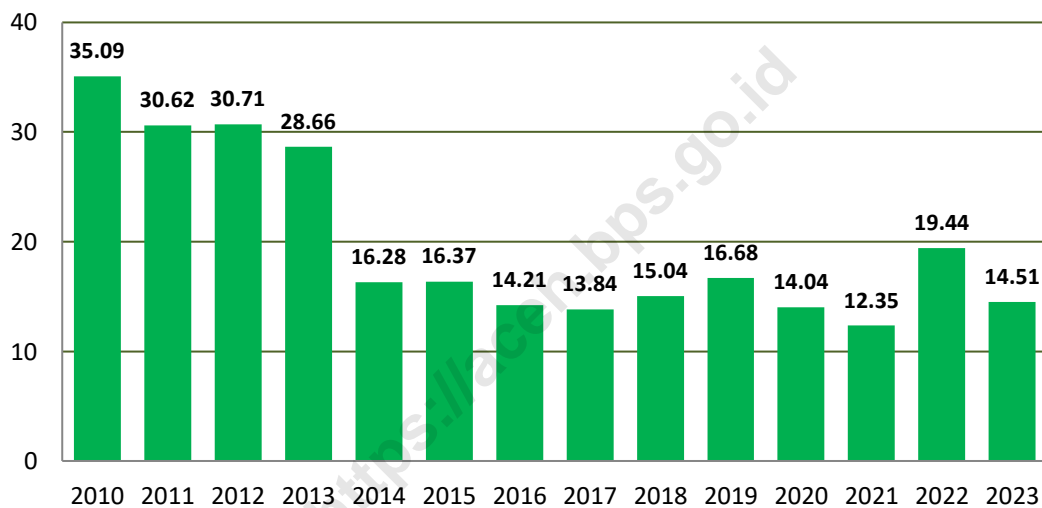
Disparitas capaian APS yang terjadi pada level kabupaten/kota memiliki persentase yang beragam dari tahun ke tahun menurut kelompok umur. Pada tahun 2023, kota Langsa mencatat angka APS tertinggi dan Kabupaten Nagan Raya terendah untuk kelompok umur 7-12 tahun, dengan disparitas sebesar 1,51 poin. Sementara untuk usia sekolah menengah pertama (13-15 tahun), Kabupaten Aceh Jaya memiliki APS tertinggi pada tahun 2023, yaitu 99,91 persen. Capaian ini berselisih sebesar 5,65 poin dari APS terendah yaitu APS Kabupaten Aceh Barat Daya yang sebesar 94,26 persen. Lebih lanjut, untuk APS 16-18 tahun, Kota Banda Aceh merupakan daerah dengan capaian APS tertinggi dan Aceh Timur terendah pada tahun 2023 dengan disparitas kedua kabupaten ini cukup besar yaitu 29,90 poin.

Salah satu hambatan peningkatan kapasitas dasar penduduk adalah tingginya biaya pendidikan (dana pengembangan sekolah, uang Komite Sekolah, baju seragam, dan perlengkapan sekolah lainnya). Ketidakmampuan untuk membiayai sekolah akan berdampak pada pilihan untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau tidak menamatkan jenjang pendidikan yang sedang dijalani. Menyikapi hal ini, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota telah membebaskan biaya pendidikan, memberikan biaya bantuan yatim piatu, dan pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu. Namun, sepertinya manfaat dari program tersebut belum sepenuhnya dapat dinikmati secara luas oleh masyarakat, sehingga angka putus sekolah cukup tinggi pada kelompok umur 16-18 tahun di Provinsi Aceh.

3.2 Capaian dan Tantangan Bidang Kesehatan

Salah satu upaya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah melalui peningkatan kualitas hidup manusia dari sisi kesehatan. Selain pendidikan, derajat kesehatan menjadi salah satu pilar penentu kualitas hidup manusia sehingga pemerintah diharapkan memiliki tingkat kepedulian tinggi, peran dari seluruh masyarakat untuk mendukung dan menjaga berbagai fasilitas kesehatan agar peningkatan derajat kesehatan dapat tercapai dengan maksimal.

Gambar 3.2 Angka Kesakitan Penduduk Aceh, 2010-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik

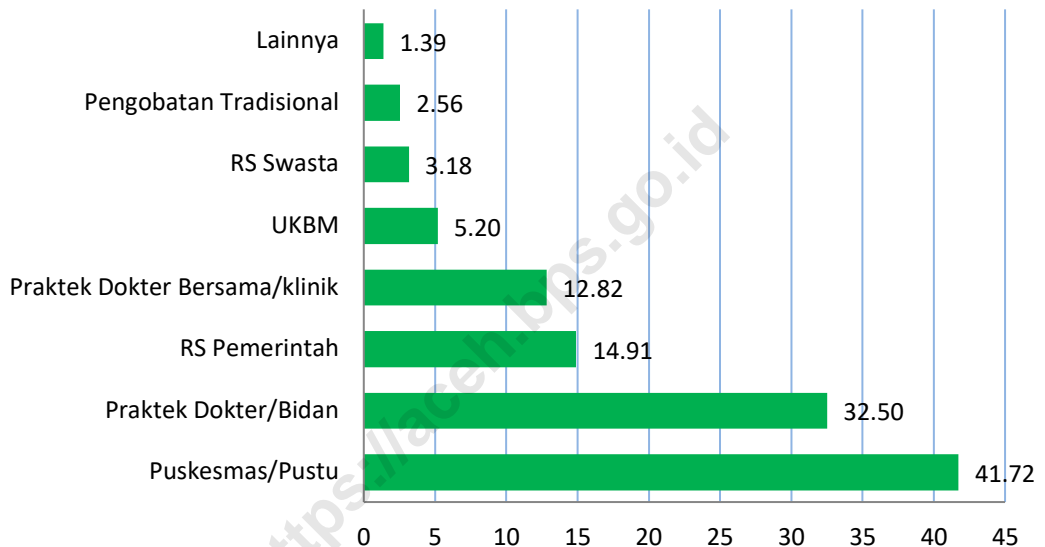
Dengan tercapainya tujuan pembangunan di bidang kesehatan, diharapkan status kesehatan yang optimal dapat menjadikan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur status kesehatan adalah angka morbiditas (angka kesakitan).

Penduduk yang mengalami morbiditas adalah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Berdasarkan data Susenas tahun 2023, angka morbiditas (angka kesakitan) penduduk Aceh adalah sebesar 14,51 menurun sangat tajam dari tahun sebelumnya tercatat sebesar 19,44 persen.

Dalam mengobati keluhan penyakit, masyarakat Aceh umumnya lebih memilih berobat jalan ke fasilitas kesehatan seperti praktek dokter/bidan dan puskesmas/pustu. Pada tahun 2023, persentase penduduk Aceh yang memanfaatkan fasilitas praktek

dokter/bidan dan puskesmas/pustu masing-masing adalah sebanyak 38,14 dan 32,18 persen. Persebaran puskesmas/pustu di hampir semua kecamatan di Aceh semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga mempermudah akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai. Sementara persentase jumlah penduduk yang berobat jalan di Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta masing-masing hanya sebesar 8,47 persen dan 1,27 persen.

Gambar 3.3 Persentase Penduduk Aceh Menurut Tempat/Cara Berobat Jalan, 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik

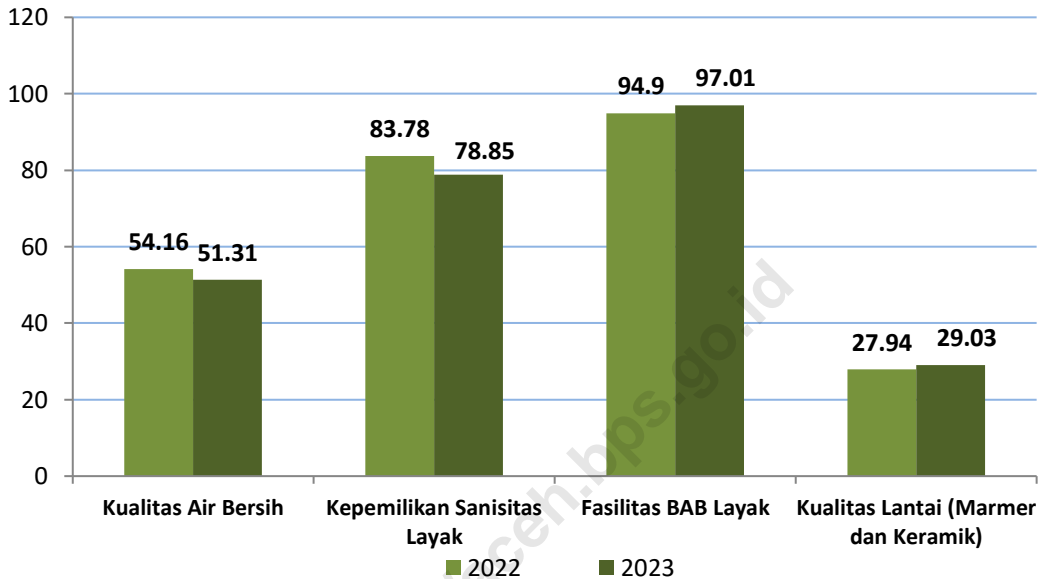
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat diukur dari tingkat mortalitas dan morbiditas penduduk dipengaruhi oleh empat faktor penentu, yaitu: faktor lingkungan, perilaku kesehatan, pelayanan kesehatan, dan kependudukan/keturunan. Berdasarkan konsep derajat kesehatan, faktor terbesar yang memengaruhi derajat kesehatan seseorang yaitu faktor lingkungan. Konsep ini menegaskan bahwa lingkungan yang baik akan mendorong secara langsung peningkatan derajat kesehatan. Tidak hanya itu, lingkungan yang baik juga secara tidak langsung berhubungan dengan keturunan dan pelayanan kesehatan.

Kondisi fisik rumah dinilai sangat mempengaruhi kesehatan penduduk. Bahkan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/MenKes/SK/VII/1999 tentang persyaratan kesehatan perumahan. Dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa kelompok penilaian rumah

Peningkatan Kapabilitas Dasar Manusia

sehat meliputi komponen rumah (dinding, lantai, langit-langit, dan ventilasi), komponen sanitasi (air bersih, pembuangan kotoran, limbah, dan sampah) serta komponen perilaku penghuni rumah (membuka jendela, membersihkan rumah, membuang sampah pada tempatnya).

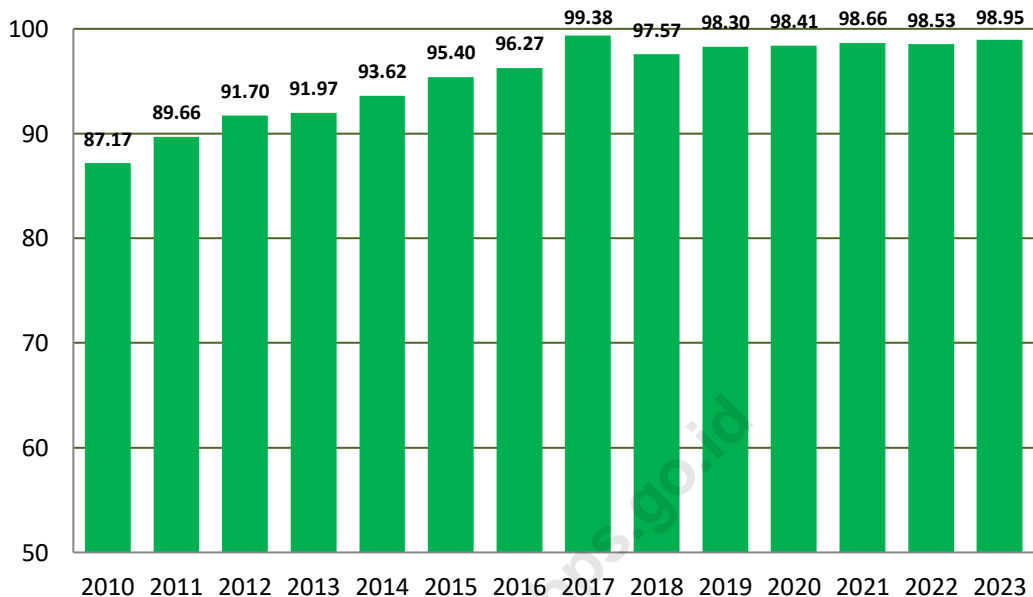
Gambar 3.4 Beberapa Indikator Sanitasi dan Rumah Sehat Provinsi Aceh, 2022-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik

Kondisi rumah tangga di Aceh, seperti pada Gambar 3.4 menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 78,85 persen rumah tangga yang sudah memiliki sanitasi layak. Kondisi ini menurun jika dibandingkan tahun 2022 tercatat sebesar 83,78 persen. Sementara itu, jumlah rumah tangga dengan fasilitas BAB layak (kloset leher angsa dan tangki septik) mengalami peningkatan dari 94,90 persen pada tahun 2022 menjadi 97,01 persen pada tahun 2023. Di sisi lain, sekitar 51,31 persen penduduk Aceh yang mengkonsumsi air bersih berupa air mineral (bermerek dan isi ulang) dan air ledeng (meteran dan eceran). Selanjutnya, menilik indikator kualitas lantai (menggunakan marmer dan keramik), tercatat sebanyak 29,30 persen rumah tangga di Aceh menggunakan bahan bangunan utama lantai rumah terluas menggunakan marmer dan keramik. Sebagian besar (59,09 persen) menggunakan semen sebagai bahan bangunan utama, sisanya dari papan/kayu 8,57 persen, tanah tercatat 1,93 persen, dan bambu 0,31 persen.

Gambar 3.5 Persentase Persalinan Ditolong Tenaga Medis di Provinsi Aceh, 2010-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik

Indikator lainnya sebagai faktor pendukung upaya peningkatan pembangunan manusia melalui aspek kesehatan adalah pelayanan persalinan oleh tenaga medis. Hal ini pelayanan kesehatan yang pertama kali bagi manusia sejak lahir ke dunia yaitu berawal dari proses persalinan. Tersedianya pelayanan kesehatan untuk persalinan dilakukan oleh tenaga medis (dokter spesialis kandungan, dokter umum, bidan berijazah, dan tenaga kesehatan lainnya) adalah faktor penting untuk menyelamatkan ibu dan bayinya. Praktek persalinan yang aman, tentu menjadi incaran rumah tangga untuk menurunkan resiko-resiko medis hingga menekan angka kematian karena proses kelahiran.

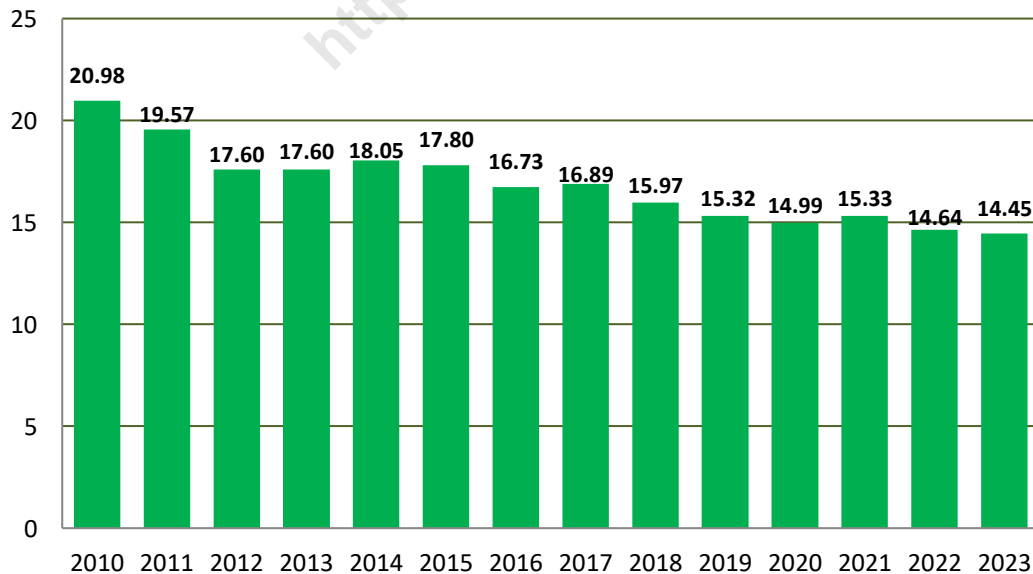
Di Provinsi Aceh proses persalinan yang dibantu tenaga medis pada tahun 2023 mencapai 98,95 persen. Capaian ini tentu saja menggembirakan karena hanya 0,79 persen penduduk di Aceh yang proses kelahiran bayinya tidak ditolong oleh tenaga medis, tetapi ditolong oleh dukun beranak/paraji. Sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar 3.5 menunjukkan tren persentase persalinan ditolong tenaga medis (dokter spesialis kandungan, dokter umum, bidan berijazah, dan perawat) pada periode tahun 2010 hingga 2023.

3.3 Capaian dan Tantangan di Bidang Sosial Ekonomi

Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah yaitu penanganan kemiskinan. Sebagai salah satu masalah pokok dalam pembangunan yang sifatnya multiaspek sehingga kemiskinan merupakan tantangan yang penanganannya juga perlu mendapat perhatian khusus. Kemiskinan dapat mengakibatkan individu atau masyarakat kehilangan kesempatan untuk meningkatkan potensi dirinya, seperti dalam mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai, padahal kedua aspek tersebut merupakan faktor esensial dalam pembangunan manusia.

Meskipun tingkat kemiskinan memiliki hubungan yang signifikan dengan indeks pembangunan manusia, namun mencermati tingkat kemiskinan penduduk merupakan bagian dari tantangan pembangunan bidang sosial-ekonomi. Kecenderungan tingkat kemiskinan Provinsi Aceh selama tahun 2010 hingga 2022 menunjukkan arah penurunan persentase juga disertai dengan fluktuasi naik-turun. Pada tahun 2021 kemiskinan mengalami sedikit peningkatan sebesar 15,33 persen dari tahun 2020 sebesar 14,99 persen, namun kembali mengalami penurunan secara berturut turut hingga pada tahun 2023 tercatat sebesar 14,45 persen (kondisi Maret).

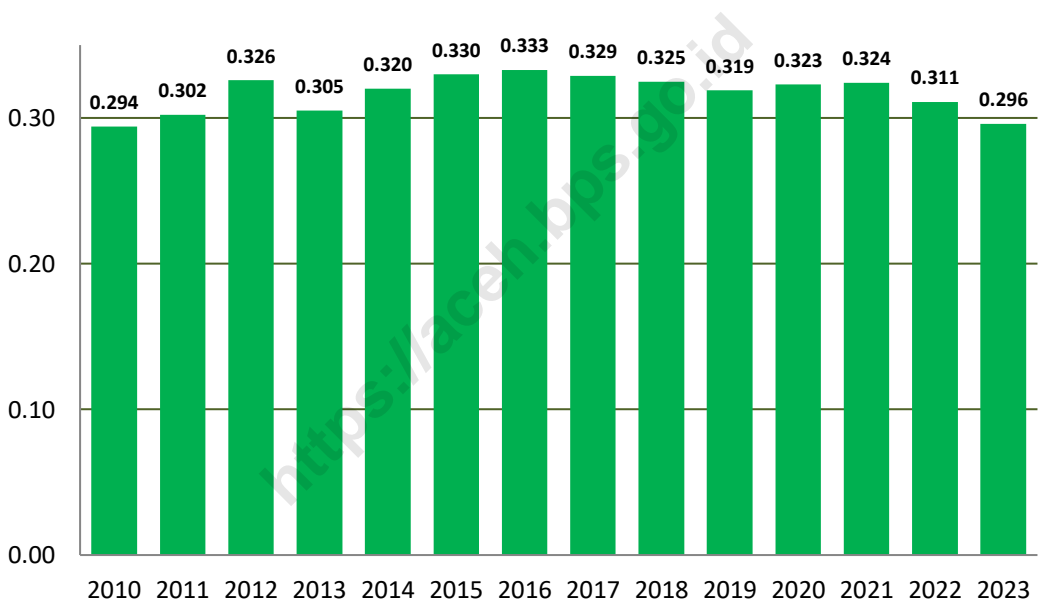
Gambar 3.6 Tren Kemiskinan Provinsi Aceh, 2010-2023 (Maret)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Membahas lebih detil tentang pendapatan, terdapat salah satu indikator yang menjelaskan ukuran pemerataan pendapatan penduduk terhadap suatu wilayah. Indikator yang digunakan adalah gini rasio, yaitu menggambarkan besar kecilnya ketimpangan pendapatan penduduk. Semakin tinggi angka gini rasio, semakin lebar pula terjadi ketimpangan pendapatan antarpenduduknya. Di Provinsi Aceh, indikator ini masih fluktuatif, setelah sempat mencapai titik rendah pada tahun 2010 (0,294), gini rasio Aceh pada tahun 2023 kembali mencapai angka 0,296 (Maret 2023). Hal ini bermakna bahwa pendapatan penduduk pada tahun 2023 cenderung lebih merata dibanding kondisi tahun 2022.

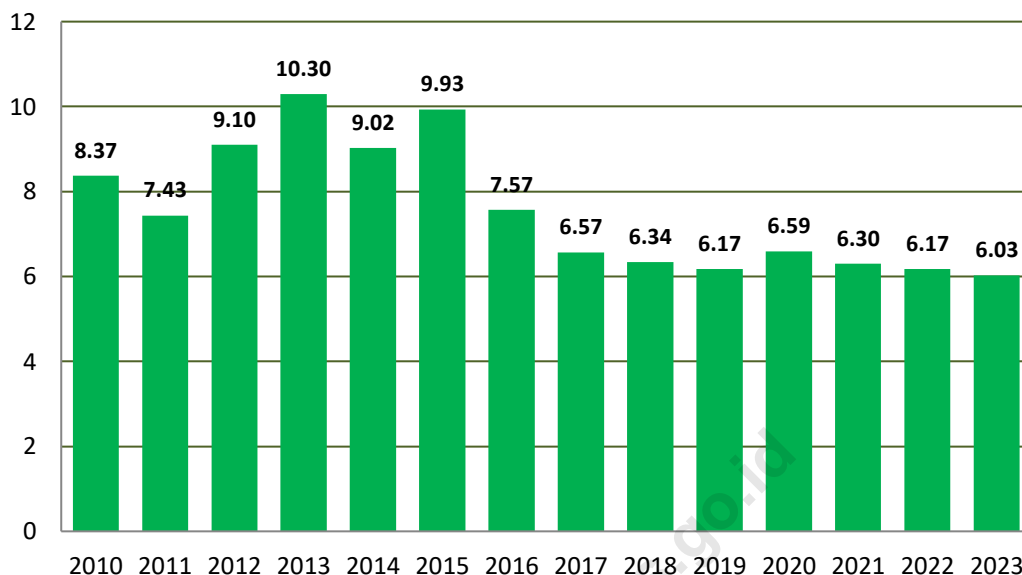
Gambar 3.7 Tren Gini Rasio Provinsi Aceh, 2010-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik

Selain masalah kemiskinan, tantangan berikutnya dalam pembangunan ekonomi Aceh adalah masalah ketersediaan lapangan kerja dan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Keterkaitan antara kemiskinan dan pengangguran dapat dikatakan cukup dekat karena memberi dampak luas dan langsung terhadap kehidupan masyarakat. Sama halnya dengan angka kemiskinan, persentase pengangguran di provinsi Aceh juga menunjukkan pergerakan yang belum stabil. Hal ini disebabkan oleh faktor musiman yang terjadi di perdesaan yaitu tenaga kerja di sektor pertanian.

Gambar 3.8 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Aceh, 2010-2023 (Agustus)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Selama tahun 2010 hingga 2015 terjadi fluktuasi penurunan dan peningkatan tingkat pengangguran di Aceh, seperti ditunjukkan pada Gambar 3.8. Namun selanjutnya, tingkat pengangguran Aceh terus mengalami penurunan hingga menjadi 6,17 persen pada tahun 2019, namun mengalami sedikit peningkatan 6,59 persen pada tahun 2020, kemudian secara berturut-turut kembali menurun pada tahun 2021 sebesar 6,30 persen hingga 2023 tercatat sebesar 6,03 persen.

4

DISPARITAS PENCAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA ACEH

Kesenjangan capaian pembangunan manusia antarkabupaten/kota merupakan tantangan yang masih harus dihadapi pemerintah. Perhatian khusus perlu diberikan untuk kabupaten/kota dengan capaian IPM terendah, yaitu kota Subulussalam, kabupaten Simeulue, dan kabupaten Aceh Barat Daya.

Halaman ini sengaja dikosongkan

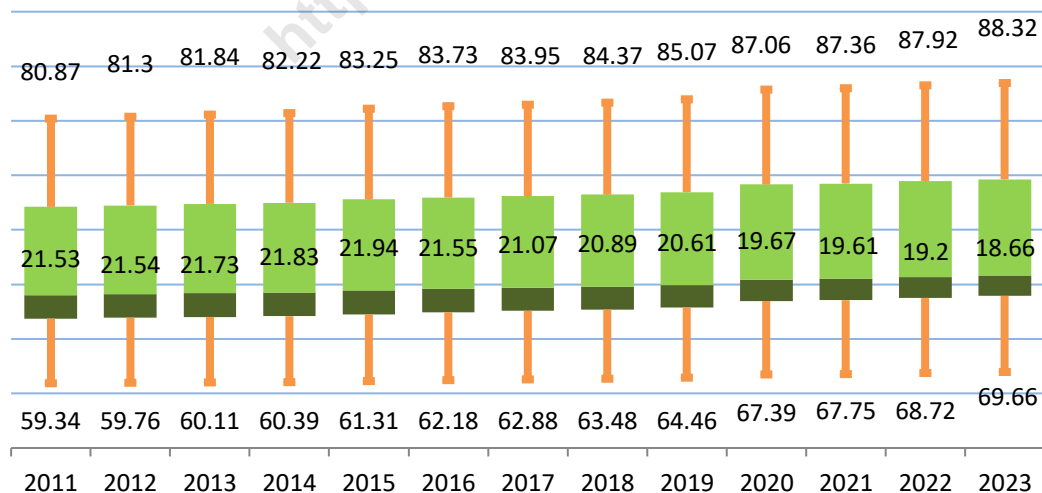
<https://aceh.bps.go.id>

DISPARITAS PENCAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA ACEH

Ketidaktermerataan perkembangan maupun penyebaran program pembangunan tentunya berakibat pada ketimpangan yang terjadi di daerah. Kesenjangan ini merupakan permasalahan yang selalu muncul dalam pelaksanaan pembangunan. Di samping itu juga terdapat perbedaan kesempatan untuk berpartisipasi dalam program pembangunan. Seperti telah dibahas bahwa perkembangan IPM Aceh dari tahun 2011-2023 terus mengalami peningkatan. Namun peningkatan pembangunan manusia Aceh secara umum ini juga menggambarkan terjadinya kesenjangan antarkabupaten/kota. Hal ini disebabkan kabupaten/kota mempunyai kecepatan capaian komponen yang berbeda.

Disparitas pembangunan manusia di Aceh periode 2011 - 2015 menunjukkan terjadinya pelebaran kesenjangan antardaerah. Pada tahun 2011, disparitas antara IPM tertinggi yang dicapai oleh Kota Banda Aceh sebesar 80,87 dan IPM terendah yang terjadi di Kota Subulussalam sebesar 59,34, mencapai 21,53 poin. Namun jika diamati sejak 2016 hingga 2023, disparitas menunjukkan nilai yang menurun. Pada tahun 2023, IPM tertinggi yang dicapai oleh Kota Banda Aceh sebesar 88,32 dengan IPM terendah yang terjadi di Kota Subulussalam sebesar 69,20, mencapai 20,66 poin.

Gambar 4.1 Disparitas Pembangunan Manusia antarkabupaten/kota di Provinsi Aceh, 2011-2023

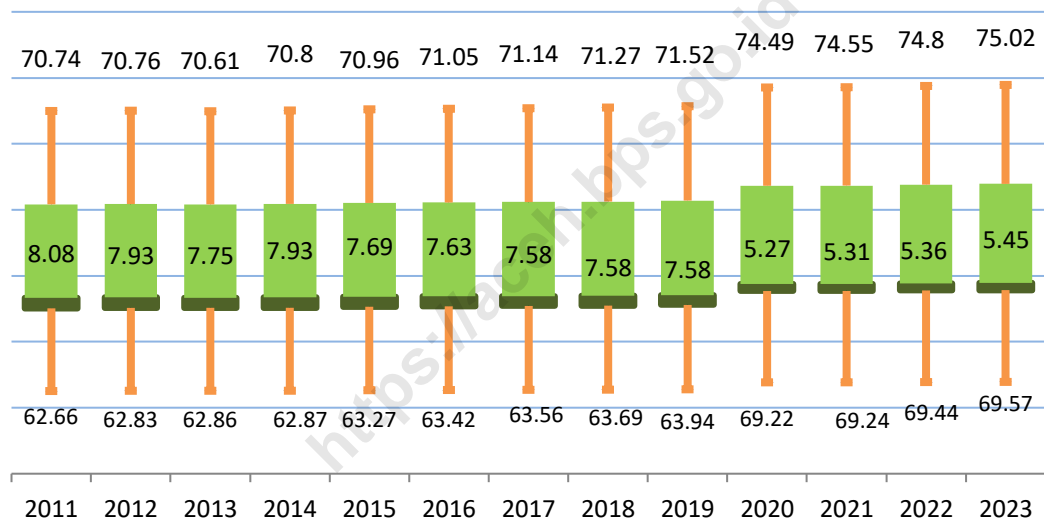


Sumber: Badan Pusat Statistik

Dinamika perubahan disparitas nilai IPM merupakan agregat dari naik-turunnya disparitas komponen pembentuk IPM. Untuk komponen hidup sehat, Umur Harapan Hidup (UHH) masing-masing kabupaten/kota telah memotret bagaimana perbedaan

tinggi-rendahnya komponen ini. Tren UHH setiap tahunnya memperlihatkan adanya penurunan disparitas. Tahun 2011, UHH tertinggi dicapai oleh Kota Banda Aceh (70,74 tahun) yang berbeda sebanyak 8,08 poin dari UHH terendah yang dicapai oleh Kota Subulussalam (62,66 tahun). Pergeseran waktu disertai dengan adanya perbaikan atau penambahan fasilitas penunjang kebutuhan hidup sehat mengakibatkan disparitas UHH semakin menyempit. Pada tahun 2023, UHH tertinggi dimiliki oleh Kota Banda Aceh sebesar 75,02 tahun dan UHH terendah dimiliki Kota Subulussalam (69,57 tahun) menghasilkan disparitas sebesar 5,45 poin.

Gambar 4.2 Disparitas Umur Harapan Hidup antarkabupaten/kota di Provinsi Aceh, 2011-2023



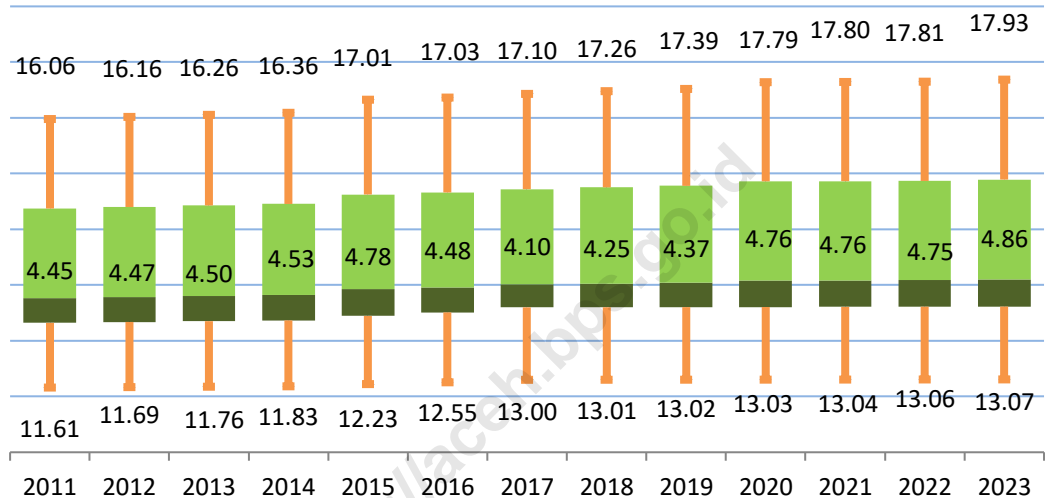
Sumber: Badan Pusat Statistik

Selanjutnya dikaji bagaimana perbedaan antardaerah di Aceh pada aspek pendidikan. Pada penghitungan IPM, komponen Harapan Lama Sekolah telah dihitung sesuai dengan pendekatan dari data hasil Susenas. Tapi kabupaten/kota dengan program pembangunannya masing-masing akan memperlihatkan hasil realisasi kerja pemerintahannya melalui indikator yang terukur pada aspek-aspek pembangunannya.

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang masuk dalam skala prioritas program pembangunan daerah. Namun, dari segi kualitas pembangunan manusia, kesenjangan antara daerah yang sudah lebih baik komponen pendidikannya dibandingkan daerah yang belum berkembang menjadi semakin melebar. Sebagaimana ditampilkan pada Gambar 4.3, disparitas HLS antarkabupaten/kota di Aceh berfluktuasi

dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, jarak antara HLS tertinggi (Kota Banda Aceh: 17,93 tahun) dan HLS terendah (Kabupaten Aceh Timur: 13,07 tahun) adalah sebesar 4,86 poin. Angka tersebut meningkat 0,11 poin jika dibanding disparitas harapan lama sekolah tahun 2022.

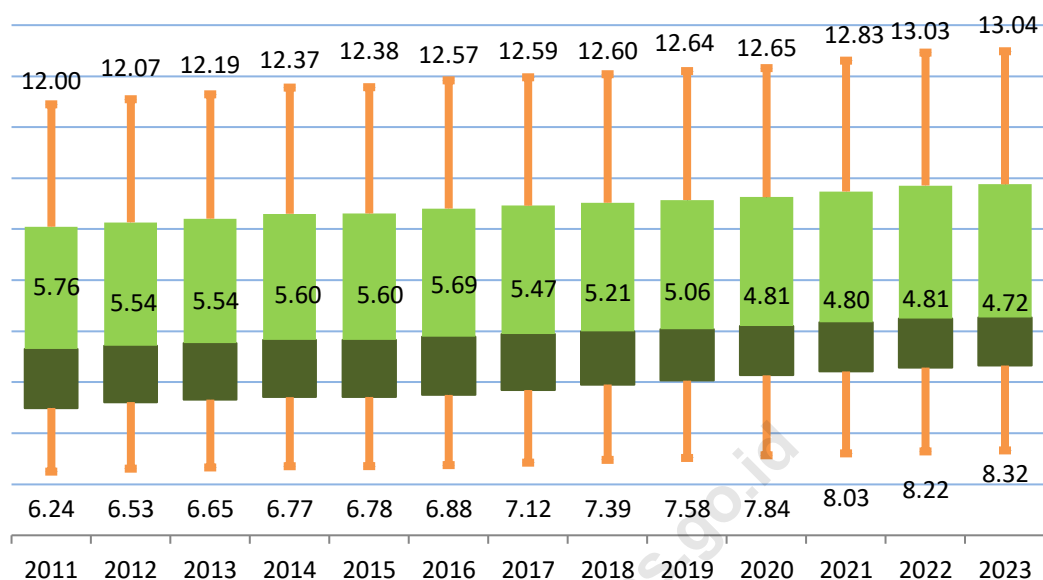
Gambar 4.3 Disparitas Harapan Lama Sekolah antarkabupaten/kota di Provinsi Aceh, 2011-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik

Selanjutnya adalah disparitas komponen rata-rata lama sekolah (RLS) yang disajikan dalam Gambar 4.4. Berbeda dengan komponen harapan lama sekolah (HLS) yang disparitasnya agak meningkat setiap tahunnya, komponen RLS justru menyatakan bahwa perbedaan antarkabupaten/kota cenderung semakin menurun atau lebih merata, sebagaimana yang ditampilkan tahun 2023 terjadi penurunan disparitas sebesar 0,09 poin dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2011, disparitas rata-rata lama sekolah antara daerah yang tertinggi RLS-nya (Banda Aceh: 12,00 tahun) dibandingkan dengan daerah yang paling rendah RLS-nya (Gayo Lues: 6,24 tahun) adalah sebesar 5,76 tahun. Hal ini bermakna bahwa, pada tahun 2011, ketika penduduk usia 25 tahun ke atas di Kota Banda Aceh bersekolah menyelesaikan jenjang SLTA, penduduk di Kabupaten Gayo Lues justru hanya menikmati sekolah sampai dengan kelas 1 SLTP sederajat. Pada tahun 2023, disparitas RLS mengalami penurunan 4,72 dari tahun sebelumnya tercatat 4,81 yaitu perbedaan antara RLS di Kota Banda Aceh (13,04 tahun) dengan RLS di Kota Subulussalam (8,32 tahun).

Gambar 4.4 Disparitas Rata-Rata Lama Sekolah antarkabupaten/kota di Provinsi Aceh, 2011-2023

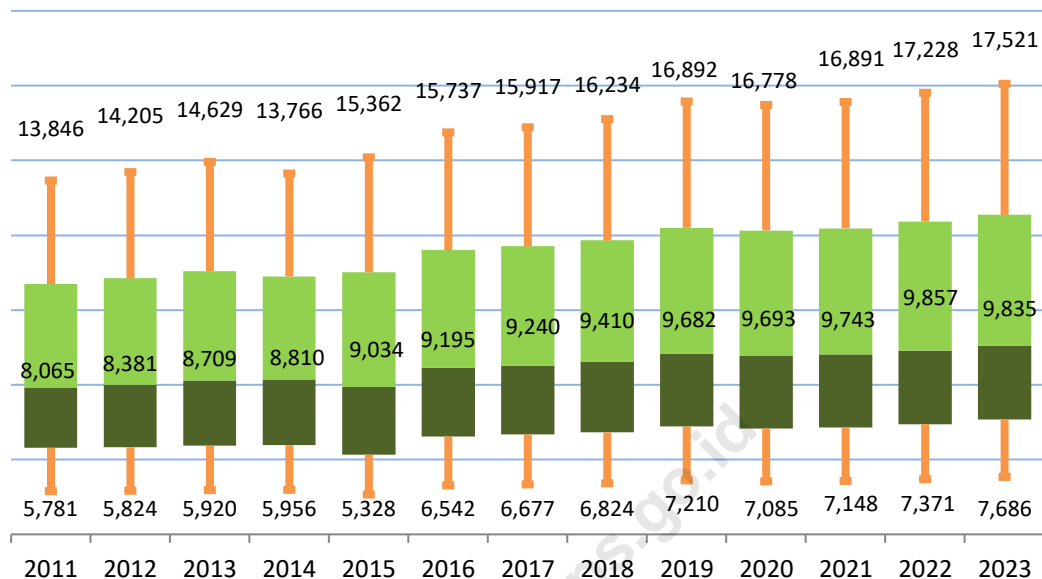


Sumber: Badan Pusat Statistik

Beralih ke komponen IPM selanjutnya, ketimpangan pembangunan manusia pada komponen standar hidup layak dapat dilihat dari besarnya perbedaan indikator pengeluaran per kapita disesuaikan (PPP). Keberagaman perkembangan atau pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terjadi di kabupaten/kota memunculkan kondisi perekonomian yang mempunyai tingkatan yang tidak sama.

Disparitas PPP penduduk di Aceh pada tahun 2011 adalah sebesar 8,07 juta rupiah. Hal ini adalah rentang perbedaan antara daerah yang memiliki PPP tertinggi yaitu Kota Banda Aceh (13,846 juta rupiah) dibandingkan dengan Kabupaten Simeulue yang mencapai PPP terendah (5,781 juta rupiah). Sama halnya dengan beberapa komponen IPM lainnya mengalami disparitas dari tahun ke tahun, pada dimensi standar hidup layak juga menunjukkan rentang yang semakin melebar dari tahun 2011 hingga tahun 2022. Sementara, disparitas PPP pada tahun 2023 mencapai 9,84 juta rupiah, yaitu perbedaan antara PPP Kota Banda Aceh dan PPP Kabupaten Simeulue, sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya.

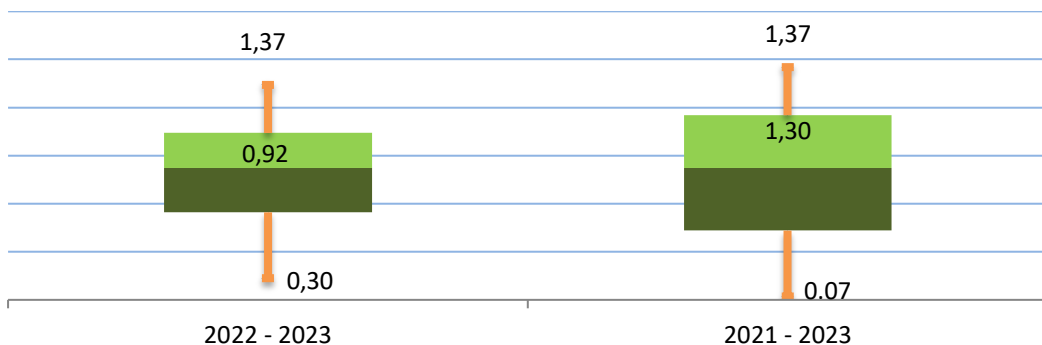
Gambar 4.5 Disparitas Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan antarkabupaten/kota di Provinsi Aceh, 2011-2023 (dalam ribu rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Pembahasan disparitas IPM tidak hanya dapat dicermati dari kesenjangan pada aspek-aspek pembentuk IPM saja. Namun demikian, kesenjangan capaian pembangunan manusia juga dapat dilihat dari perbedaan laju pertumbuhan IPM masing-masing kabupaten/kota. Ilustrasi perbedaan variasi pertumbuhan IPM antarkabupaten/kota disajikan pada Gambar 4.6 menggambarkan pertumbuhan pembangunan manusia pada periode tahun 2021-2023 dan tahun 2021 – 2023 (UHH SP2020LF).

Gambar 4.6 Disparitas Pertumbuhan IPM Antarkabupaten di Provinsi Aceh, 2021-2023 (UHH SP2020LF)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Jelaslah bahwa disparitas pertumbuhan IPM di Aceh pada periode 2022-2023 (0,92 poin) lebih rendah (relatif lebih merata) dari disparitas pertumbuhan IPM pada periode 2021-2023 (1,30 poin). Hal ini berarti bahwa pertumbuhan IPM tahun 2023 terhadap IPM 2022 lebih bervariasi antarkabupaten/kota dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan selama periode 2021-2022. Semakin tinggi perbedaan/disparitas pertumbuhan IPM, semakin tidak merata kecepatan pembangunan manusia menuju ideal antarkabupaten/kota di Provinsi Aceh.

<https://aceh.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (2023). **Indeks Pembangunan Manusia 2023**.
- Badan Pusat Statistik (2023). **Indikator Pembangunan Berkelanjutan 2023**.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (2023). **Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Aceh 2023**. Banda Aceh.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (2023). **Indikator Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Aceh 2023**. Banda Aceh.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (2024). **Statistik Kesehatan Provinsi Aceh 2023**. Banda Aceh.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (2024). **Indikator Tenaga Kerja Provinsi Aceh Agustus 2023**. Banda Aceh.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (2024). **Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Aceh 2023**. Banda Aceh.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (2024). **Provinsi Aceh Dalam Angka 2023**. Banda Aceh.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (2023). **Provinsi Aceh Dalam Angka 2022**. Banda Aceh.
- H. Preston, Samuel, et. all. (2004). **Demography: Measuring and Modelling Population Processes**. USA: Blackwell.
- Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan BPS (2023). **Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2023**. Jakarta
- UNDP, BPS, dan Bappeda Aceh. (2010). **Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010: Pembangunan Manusia dan Peberdayaan Masyarakat**. Jakarta
- United Nations Development Programme (2019). **Human Development Report**. New York: UNDP
- (2020). **Human Development Report**. New York: UNDP.
- (2021). **Human Development Report**. New York: UNDP.
- (2022). **Human Development Report**. New York: UNDP.

----- (2023). **Human Development Report**. New York: UNDP.

----- (2024). **Human Development Report**. New York: UNDP.
<http://id.wikipedia.org>

<https://aceh.bps.go.id>

<https://aceh.bps.go.id>

Lampiran

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://aceh.bps.go.id>

Lampiran 1. Umur Harapan Hidup Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota, 2012-2023

Propinsi/ Kabupaten/Kota	Tahun											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	69,23	69,31	69,35	69,50	69,51	69,52	69,64	69,87	72,69	72,71	72,92	73,06
01. Simeulue	64,22	64,23	64,24	64,66	64,78	64,90	65,00	65,22	69,22	69,24	69,44	69,57
02. Aceh Singkil	66,85	66,91	66,94	66,97	67,02	67,07	67,16	67,36	69,45	69,49	69,72	69,85
03. Aceh Selatan	63,12	63,16	63,18	63,61	63,75	63,89	64,02	64,27	69,85	69,91	70,15	70,33
04. Aceh Tenggara	66,96	67,03	67,07	67,40	67,51	67,62	67,77	68,04	72,08	72,16	72,43	72,62
05. Aceh Timur	68,02	68,05	68,06	68,20	68,26	68,33	68,44	68,67	71,78	71,80	72,00	72,13
06. Aceh Tengah	68,30	68,35	68,38	68,44	68,48	68,53	68,62	68,82	72,61	72,62	72,81	72,93
07. Aceh Barat	67,25	67,30	67,33	67,49	67,56	67,62	67,72	67,93	71,56	71,57	71,76	71,89
08. Aceh Besar	69,41	69,44	69,46	69,47	69,49	69,52	69,59	69,77	72,78	72,79	72,97	73,11
09. Pidie	66,25	66,27	66,28	66,46	66,52	66,58	66,68	66,89	69,55	69,56	69,75	69,88
10. Bireuen	70,32	70,34	70,35	70,64	70,72	70,80	70,92	71,16	73,26	73,30	73,50	73,66
11. Aceh Utara	68,40	68,41	68,42	68,48	68,51	68,54	68,61	68,79	72,30	72,30	72,50	72,63
12. Aceh Barat Daya	63,63	63,69	63,72	64,20	64,35	64,51	64,65	64,91	69,98	70,04	70,28	70,47
13. Gayo Lues	64,38	64,42	64,44	64,77	64,88	64,98	65,12	65,38	69,32	69,39	69,64	69,80
14. Aceh Tamiang	68,65	68,66	68,67	68,99	69,08	69,16	69,28	69,52	73,17	73,22	73,46	73,63
15. Nagan Raya	68,26	68,28	68,29	68,59	68,67	68,76	68,89	69,14	72,17	72,19	72,39	72,53
16. Aceh Jaya	66,39	66,45	66,48	66,63	66,70	66,77	66,88	67,11	70,39	70,41	70,62	70,76
17. Bener Meriah	68,58	68,62	68,64	68,79	68,85	68,90	68,99	69,19	72,44	72,48	72,69	72,85
18. Pidie Jaya	69,07	69,11	69,13	69,49	69,59	69,68	69,81	70,06	72,74	72,77	72,98	73,16
71. Banda Aceh	70,76	70,79	70,80	70,89	70,92	70,96	71,10	71,36	74,49	74,55	74,80	75,02
72. Sabang	69,54	69,54	69,54	69,93	70,01	70,09	70,21	70,45	72,91	72,95	73,17	73,34
73. Langsa	68,75	68,78	68,79	68,94	69,00	69,06	69,16	69,37	73,64	73,65	73,84	73,98
74. Lhokseumawe	70,59	70,61	70,62	70,96	71,05	71,14	71,27	71,52	74,34	74,38	74,59	74,76
75. Subulussalam	62,83	62,86	62,87	63,27	63,42	63,56	63,69	63,94	69,22	69,28	69,55	69,68

Lampiran 2. Harapan Lama Sekolah Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota, 2011-2023

Propinsi/ Kabupaten/Kota	Tahun												
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Aceh	13,03	13,19	13,36	13,53	13,73	13,89	14,13	14,27	14,30	14,31	14,36	14,37	14,38
01. Simeulue	12,66	12,67	12,67	12,75	12,83	13,07	13,23	13,25	13,51	13,76	13,90	14,08	14,28
02. Aceh Singkil	12,84	13,49	13,85	14,05	14,26	14,27	14,28	14,29	14,30	14,31	14,32	14,34	14,35
03. Aceh Selatan	12,51	12,57	13,01	13,05	13,24	13,53	13,80	14,15	14,41	14,42	14,60	14,69	14,70
04. Aceh Tenggara	12,66	13,18	13,54	13,59	13,62	13,96	13,97	13,98	13,99	14,00	14,01	14,26	14,27
05. Aceh Timur	11,61	11,69	11,76	11,83	12,23	12,55	13,00	13,01	13,02	13,03	13,04	13,06	13,07
06. Aceh Tengah	13,49	13,55	13,76	14,11	14,21	14,23	14,24	14,25	14,26	14,27	14,28	14,61	14,85
07. Aceh Barat	14,27	14,29	14,32	14,35	14,55	14,56	14,57	14,58	14,59	14,60	14,61	14,63	14,64
08. Aceh Besar	13,91	13,91	14,21	14,35	14,47	14,48	14,49	14,70	14,71	14,72	14,73	14,75	14,76
09. Pidie	13,07	13,21	13,36	13,50	13,61	13,93	14,25	14,44	14,45	14,46	14,47	14,49	14,50
10. Bireuen	13,83	14,03	14,22	14,25	14,41	14,42	14,80	14,81	14,82	14,83	14,84	14,86	14,87
11. Aceh Utara	13,69	13,77	13,89	13,99	14,10	14,11	14,42	14,68	14,69	14,70	14,71	14,73	14,74
12. Aceh Barat Daya	12,94	12,98	13,02	13,11	13,20	13,54	13,55	13,56	13,57	13,58	13,65	13,66	13,67
13. Gayo Lues	12,77	12,89	13,01	13,03	13,13	13,27	13,28	13,49	13,73	13,77	13,78	14,08	14,34
14. Aceh Tamiang	12,34	12,57	12,79	13,27	13,54	13,55	13,56	13,57	13,58	13,59	13,76	13,96	14,23
15. Nagan Raya	13,20	13,27	13,34	13,42	14,04	14,09	14,10	14,11	14,12	14,13	14,14	14,16	14,17
16. Aceh Jaya	12,51	13,30	13,69	13,81	13,93	13,94	13,95	13,96	13,97	13,98	13,99	14,01	14,02
17. Bener Meriah	12,69	12,78	12,93	13,02	13,04	13,42	13,43	13,44	13,45	13,46	13,47	13,71	13,72
18. Pidie Jaya	13,70	13,76	13,92	14,03	14,14	14,51	14,52	14,53	14,54	14,82	14,97	14,98	14,99
71. Banda Aceh	16,06	16,16	16,26	16,36	17,01	17,03	17,10	17,26	17,39	17,79	17,80	17,81	17,93
72. Sabang	11,91	12,07	12,23	12,39	12,98	13,17	13,58	13,66	13,81	13,95	14,13	14,40	14,68
73. Langsa	13,61	13,93	14,25	14,58	15,16	15,17	15,18	15,19	15,34	15,35	15,63	15,64	15,70
74. Lhokseumawe	14,23	14,91	14,92	15,11	15,14	15,16	15,17	15,18	15,19	15,20	15,21	15,27	15,54
75. Subulussalam	12,89	13,03	13,16	13,30	13,73	14,18	14,19	14,20	14,21	14,61	14,62	14,81	15,06

Lampiran 3. Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota, 2012-2023

Propinsi/ Kabupaten/Kota	Tahun											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	8,36	8,44	8,71	8,77	8,86	8,98	9,09	9,18	9,33	9,37	9,44	9,55
01. Simeulue	8,34	8,55	8,89	8,90	8,91	9,06	9,07	9,08	9,34	9,48	9,73	9,81
02. Aceh Singkil	7,16	7,33	7,48	7,50	7,69	7,84	8,05	8,52	8,53	8,68	8,69	8,70
03. Aceh Selatan	7,56	7,59	7,60	7,79	8,02	8,33	8,38	8,59	8,87	8,88	8,89	8,91
04. Aceh Tenggara	8,57	8,58	8,77	9,32	9,33	9,63	9,64	9,65	9,66	9,67	9,92	10,09
05. Aceh Timur	7,13	7,28	7,38	7,40	7,60	7,80	7,85	7,86	8,15	8,21	8,32	8,47
06. Aceh Tengah	9,19	9,25	9,31	9,65	9,66	9,67	9,68	9,69	9,85	9,86	9,87	9,89
07. Aceh Barat	7,77	7,83	8,17	8,47	8,70	9,04	9,08	9,09	9,37	9,55	9,87	9,98
08. Aceh Besar	9,45	9,46	9,61	9,91	9,92	9,93	10,14	10,31	10,32	10,33	10,35	10,36
09. Pidie	8,08	8,15	8,25	8,74	8,75	8,76	8,81	8,82	8,99	9,00	9,02	9,03
10. Bireuen	8,50	8,58	8,85	9,14	9,15	9,16	9,17	9,27	9,28	9,29	9,31	9,32
11. Aceh Utara	7,69	7,83	8,06	8,07	8,09	8,10	8,11	8,46	8,63	8,64	8,73	8,85
12. Aceh Barat Daya	7,53	7,69	7,89	7,90	7,93	8,12	8,13	8,35	8,66	8,67	8,68	8,77
13. Gayo Lues	6,88	7,00	7,04	7,06	7,10	7,39	7,69	7,91	8,20	8,40	8,41	8,42
14. Aceh Tamiang	7,66	7,69	7,71	7,95	8,21	8,47	8,70	8,89	8,90	8,91	9,04	9,24
15. Nagan Raya	7,73	7,78	7,93	8,22	8,24	8,25	8,26	8,50	8,68	8,69	8,95	8,96
16. Aceh Jaya	7,64	7,70	7,88	7,89	7,95	8,13	8,37	8,66	8,70	8,71	8,72	8,74
17. Bener Meriah	8,63	8,93	9,00	9,42	9,43	9,55	9,56	9,78	9,79	10,00	10,01	10,12
18. Pidie Jaya	7,93	7,95	8,30	8,45	8,46	8,84	8,86	9,04	9,33	9,34	9,53	9,58
71. Banda Aceh	12,07	12,19	12,37	12,38	12,57	12,59	12,60	12,64	12,65	12,83	13,03	13,04
72. Sabang	10,16	10,21	10,35	10,37	10,51	10,70	10,97	11,13	11,14	11,18	11,19	11,20
73. Langsa	10,43	10,47	10,48	10,49	10,71	10,90	11,06	11,10	11,11	11,12	11,14	11,27
74. Lhokseumawe	10,16	10,37	10,39	10,41	10,53	10,88	10,89	10,90	10,91	11,11	11,12	11,27
75. Subulussalam	6,53	6,65	6,77	6,78	6,88	7,12	7,39	7,58	7,84	8,03	8,22	8,32

Lampiran 4. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota, 2012-2023

Propinsi/ Kabupaten/Kota	Tahun											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(12)	(12)
Aceh	8.134	8.289	8.297	8.533	8.768	8.957	9.186	9.603	9.492	9.572	9.963	10,334
01. Simeulue	5.824	5.920	5.956	6.328	6.542	6.677	6.824	7.210	7.085	7.148	7.371	7,686
02. Aceh Singkil	7.165	7.208	7.221	7.602	8.068	8.230	8.506	8.715	8.707	8.776	8.994	9,374
03. Aceh Selatan	6.913	6.989	7.003	7.224	7.397	7.567	7.891	8.187	8.089	8.180	8.353	8,712
04. Aceh Tenggara	6.788	6.899	6.949	7.001	7.212	7.359	7.685	8.067	8.020	8.030	8.222	8,566
05. Aceh Timur	7.178	7.219	7.288	7.623	7.825	7.961	8.252	8.600	8.489	8.577	9.127	9,436
06. Aceh Tengah	9.365	9.400	9.435	9.473	9.920	10.021	10.394	10.782	10.673	10.780	10.957	11,323
07. Aceh Barat	7.688	7.744	7.771	8.135	8.559	8.989	9.134	9.692	9.516	9.593	9.775	10,085
08. Aceh Besar	8.344	8.497	8.622	8.775	8.788	8.965	9.192	9.661	9.641	9.644	9.894	10,309
09. Pidie	9.121	9.167	9.182	9.233	9.273	9.377	9.492	9.824	9.816	9.860	10.211	10,584
10. Bireuen	6.996	7.232	7.319	7.622	7.885	8.237	8.378	8.889	8.857	8.867	9.438	9,758
11. Aceh Utara	6.562	6.714	6.838	7.327	7.520	7.632	7.919	8.189	8.122	8.201	8.620	8,970
12. Aceh Barat Daya	6.828	6.966	7.059	7.303	7.567	7.723	8.093	8.491	8.316	8.428	8.651	9,043
13. Gayo Lues	7.646	7.709	7.742	7.780	8.048	8.322	8.529	8.845	8.791	8.856	9.094	9,407
14. Aceh Tamiang	7.478	7.554	7.569	7.750	7.766	7.931	8.032	8.362	8.327	8.367	8.759	9,050
15. Nagan Raya	6.902	7.019	7.084	7.141	7.460	7.732	7.936	8.348	8.216	8.292	8.581	9,062
16. Aceh Jaya	8.679	8.691	8.721	8.749	8.796	8.322	9.262	9.682	9.615	9.666	10.041	10,461
17. Bener Meriah	9.580	9.645	9.721	9.760	10.140	10.428	10.626	11.124	11.098	11.118	11.421	11,855
18. Pidie Jaya	9.027	9.173	9.260	9.398	9.590	9.691	9.967	10.364	10.071	10.290	10.701	11,005
71. Banda Aceh	14.205	14.629	14.766	15.362	15.737	15.917	16.234	16.892	16.778	16.891	17.228	17,521
72. Sabang	9.692	9.718	9.823	10.041	10.507	10.610	10.899	11.444	11.273	11.378	11.780	12,137
73. Langsa	9.925	10.198	10.284	10.605	11.015	11.261	11.497	12.099	12.057	12.067	12.353	12,678
74. Lhokseumawe	9.303	9.580	9.678	10.093	10.549	10.673	10.863	11.421	11.367	11.390	11.701	12,125
75. Subulussalam	6.275	6.320	6.326	6.504	6.669	6.887	7.039	7.463	7.317	7.385	7.689	8,065

Lampiran 5. Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota, 2012-2023

Propinsi/ Kabupaten/Kota	Tahun											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	0,53	0,72	0,75	0,93	0,79	0,85	0,84	1,00	1,93	0,26	0,86	0,80
01. Simeulue	0,36	0,70	0,81	1,58	1,04	0,92	0,51	1,48	3,35	0,57	1,29	1,17
02. Aceh Singkil	1,74	1,00	0,62	1,20	1,38	0,61	0,96	1,31	1,47	0,41	0,57	0,75
03. Aceh Selatan	0,28	0,94	0,13	1,49	1,34	1,40	1,37	1,49	4,32	0,47	0,63	0,82
04. Aceh Tenggara	1,12	0,86	0,53	1,32	1,06	0,90	0,85	1,00	2,67	0,10	1,26	1,04
05. Aceh Timur	0,93	0,54	0,47	1,54	1,35	1,37	0,75	0,85	2,42	0,29	1,31	0,86
06. Aceh Tengah	0,26	0,47	0,64	0,78	0,74	0,20	0,62	0,69	2,64	0,17	0,78	0,87
07. Aceh Barat	0,29	0,30	0,67	1,63	1,24	1,35	0,38	1,06	2,65	0,41	0,93	0,72
08. Aceh Besar	0,23	0,73	0,64	0,90	0,07	0,34	1,01	1,13	1,97	0,04	0,55	0,72
09. Pidie	0,52	0,43	0,41	1,19	0,55	0,66	0,59	0,69	2,14	0,10	0,69	0,63
10. Bireuen	0,81	0,98	0,70	1,54	0,63	1,28	0,37	1,26	1,31	0,07	1,13	0,62
11. Aceh Utara	0,93	0,83	0,87	1,40	0,51	0,71	1,02	1,26	2,50	0,18	1,08	0,90
12. Aceh Barat Daya	0,65	0,76	0,73	1,09	1,25	0,80	0,89	1,36	3,85	0,36	0,61	0,97
13. Gayo Lues	1,52	0,59	0,19	0,52	0,93	1,16	1,34	1,50	3,28	0,52	1,01	1,00
14. Aceh Tamiang	0,49	0,54	0,81	1,42	0,57	0,86	0,68	1,14	2,37	0,35	1,35	1,30
15. Nagan Raya	1,04	0,49	0,54	1,75	0,88	0,68	0,55	1,41	2,07	0,18	1,12	0,97
16. Aceh Jaya	1,92	0,75	0,57	0,34	0,25	0,54	1,12	1,32	2,24	0,13	0,74	0,72
17. Bener Meriah	1,32	0,87	0,37	0,89	1,13	0,65	0,35	1,15	2,15	0,40	0,83	0,80
18. Pidie Jaya	0,31	0,52	0,91	0,86	0,91	0,84	0,54	1,04	2,15	0,54	1,00	0,60
71. Banda Aceh	0,53	0,66	0,46	1,25	0,58	0,26	0,50	0,83	2,34	0,34	0,64	0,45
72. Sabang	0,98	0,32	0,61	1,41	1,17	1,00	0,97	1,27	1,57	0,43	0,96	0,86
73. Langsa	0,83	0,89	0,56	1,26	0,90	0,63	0,59	1,07	2,77	0,35	0,48	0,68
74. Lhokseumawe	1,66	0,79	0,42	0,90	0,89	0,73	0,37	0,89	1,75	0,34	0,58	1,11
75. Subulussalam	0,71	0,59	0,47	1,54	1,40	1,12	0,95	1,54	4,55	0,53	1,43	1,37

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://aceh.bps.go.id>

Catatan Teknis

<https://aceh.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://aceh.bps.go.id>

KONSEP PEMBANGUNAN MANUSIA

"Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan yang sederhana. Tetapi hal ini seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang."

Kalimat pembuka pada Human Development Report (HDR) pertama kali dipublikasikan oleh UNDP tahun 1990 secara jelas menekankan arti pentingnya pembangunan yang berpusat pada manusia, menempatkan manusia sebagai tujuan akhir, dan bukan sebagai alat pembangunan.

Konsep ini terdengar berbeda dibanding konsep klasik pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia memperluas pembahasan tentang konsep pembangunan dari diskusi tentang cara-cara (pertumbuhan PDB) ke diskusi tentang tujuan akhir dari pembangunan. Pembangunan manusia juga merupakan perwujudan jangka panjang, yang meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, dan bukan manusia di sekeliling pembangunan.

Mengutip isi HDR pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Untuk menghindari kekeliruan dalam memaknai konsep ini, perbedaan antara cara pandang pembangunan manusia terhadap pembangunan dengan pendekatan konvensional yang menekankan pertumbuhan ekonomi, pembentukan modal manusia, pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan rakyat, dan pemenuhan kebutuhan dasar, perlu diperjelas. Konsep pembangunan manusia mempunyai cakupan yang lebih luas dari teori konvensional pembangunan ekonomi.

Model 'pertumbuhan ekonomi' lebih menekankan pada peningkatan PNB daripada memperbaiki kualitas hidup manusia. 'Pembangunan sumber daya manusia' cenderung untuk memperlakukan manusia sebagai input dari proses produksi - sebagai alat, bukan sebagai tujuan akhir. Pendekatan 'kesejahteraan' melihat manusia sebagai penerima dan bukan sebagai agen dari perubahan dalam proses pembangunan. Adapun pendekatan 'kebutuhan dasar' terfokus pada penyediaan barang-barang dan

jasa-jasa untuk kelompok masyarakat tertinggal, bukannya memperluas pilihan yang dimiliki manusia di segala bidang.

Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi, distribusi komoditas, dan peningkatan serta pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat - pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural - dari sudut pandang manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu gender. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor.

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak (Gambar A). Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (Purchasing Power Parity). Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

UMUR HARAPAN HIDUP

Umur harapan hidup saat lahir (UHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Perhitungan umur harapan hidup melalui pendekatan tak langsung (indirect estimation), jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan AMH (Anak Masih Hidup). Paket program mortpack digunakan untuk menghitung umur harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya, dipilih metode Trussel dengan model *West*, yang sesuai histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya (preston, 2004)

Indeks harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk perhitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah 20 tahun.

Tingkat Pendidikan

Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dari dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) dan harapan lama sekolah (expected years of schooling). Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah memiliki bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia penduduk 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara (UNDP). Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang di tunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dapat dicapai oleh setiap anak. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol).

Standar Hidup Layak

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (purchasing power parity), berbasis formula :

$$PPP_j = \prod_{i=1}^M \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m} \quad (1)$$

Catatan Teknis

Keterangan:

PPPj : paritas daya beli di wilayah j.

Pij : harga komoditas I di kabupaten/kota i.

Pik : harga komoditas I di jakarta selatan.

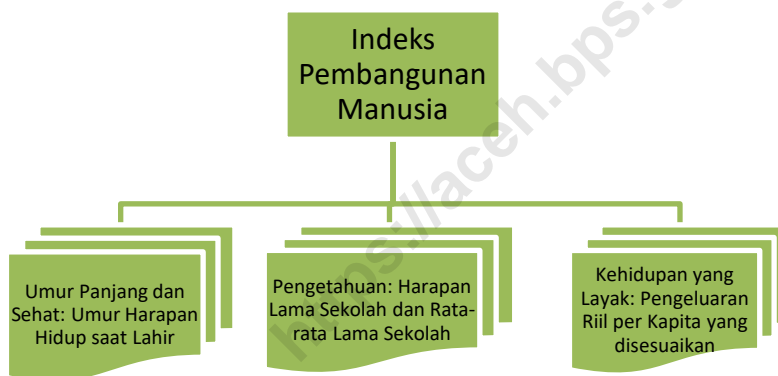
M : jumlah komoditas.

Penghitungan paritas daya beli dilakukan berdasarkan 96 komoditas kebutuhan pokok seperti terlihat dalam Tabel A. Batas maksimum dan minimum penghitungan per kapita yang digunakan dalam perhitungan IPM seperti terlihat dalam Tabel B. Batas maksimum pengeluaran per kapita adalah sebesar Rp 26.572.35 sementara batas minimumnya adalah Rp 1.007.436.

Tabel A Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli (PPP)

Beras	Pisang lainnya	Rokok kretek tanpa filter
Tepung Terigu	Pepaya	Rokok putih
Ketela pohon/Singkong	Minyak kelapa	Rumah sendiri/bebas sewa
Kentang	Minyak goreng lainnya	Rumah kontrak
Tonkol/Tuna/Cakalang	Kelapa	Rumah sewa
Kembung	Gula pasir	Rumah dinas
Bandeng	The	Listrik
Mujair	Kopi	Air PAM
Mas	Garam	LPG
Lele	Kecap	Minyak tanah
Ikan segar lainnya	Penyedap masakan/vetsin	Lainnya (batu baterai,aki,korek,obat nyamuk dll)
Daging sapi	Mie instan	Perlengkapan mandi
Daging ayam ras	Roti manis /roti lainnya	Barang kecantikan
Daging ayam kampung	Kue kering	Perawatan kulit,muka,kuku,rambut
Telur ayam ras	Kue basah	Sabun cuci
Susu kental manis	Makanan gorengan	Biaya RS pemerintah
Susu bubuk	Gado-gado/ketoprak	Biaya RS Swasta
Susu bubuk bayi	Nasi campu/remes	Puskesmas/pustu
Bayam	Nasi goreng	Praktek dokter/poliklinik
Kangkung	Nasi putih	SPP
Kacang panjang	Lontong/ketupat sayur	Bensin
Bawang merah	Soto/gule/sop/rawon/cincang	Transportasi/Pengangkutan Umum

Bawang putih	Sate/tongseng	Pos dan Telekomunikasi
Cabe merah	Mie bakso/mie goreng/mie rebus	Pakaian jadi laki-laki dewasa
Cabe rawit	Makanan ringan anak	Pakaian jadi perempuan dewasa
Tahu	Ikan (goreng/bakar/dll)	Pakaian jadi anak-anak
Tempe	Ayam/daging (goreng dll)	Alas kaki
Jeruk	Makanan jadi lainnya	Minyak pelumas
Mangga	Air kemasan galon	Meubelair
Salak	Minuman jadi lainnya	Peralatan rumah tangga
Pisang ambon	Es lainnya	Perlengkapan perabot rumah tangga
Pisang raja	Rokok kretek filter	Alat dapur/makan



Gambar A

Diagram
Penghitungan IPM

Sumber: Badan Pusat Statistik

Penyusunan Indeks

Sebelum penghitungan IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksinya. Formula yang digunakan dalam penghitungan indeks komponen IPM adalah sebagai berikut:

$$I_{UHH} = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{max} - UHH_{min}} \quad (2)$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}} \quad (3)$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}} \quad (4)$$

Catatan Teknis

$$I_{\text{pengetahuan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2} \quad (5)$$

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln \text{pengeluaran}_{\text{min}}}{\ln \text{pengeluaran}_{\text{max}} - \ln \text{pengeluaran}_{\text{min}}} \quad (6)$$

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam Tabel B.

Tabel B Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM

Komponen IPM	Satuan	Minimum	Maksimum
Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH)	Tahun	20	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	15
Pengeluaran Per Kapita	Rupiah	1.007.436	26.572.352

Keterangan:

- Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 010 (data empiris) yaitu Tolikara – Papua
- Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan 2025.

Selanjutnya nilai IPM dapat dihitung sebagai:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}}$$

Status Pembangunan Manusia

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan kedalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

1. Kelompok “sangat tinggi” :IPM \geq 80
2. Kelompok “tinggi” :70 \leq IPM < 80
3. Kelompok “sedang” :60 \leq IPM < 70
4. Kelompok “rendah” :IPM < 60

Pertumbuhan IPM

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara perubahan capaian terkini dengan capaian tahun sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM, maka semakin cepat pula peningkatan IPM. Indikator pertumbuhan IPM ini dapat digunakan sebagai kinerja pembangunan manusia suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{IPM_t - IPM_{t-1}}{IPM_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

IPM_t : IPM suatu wilayah pada tahun t

$IPM_{(t-1)}$: IPM suatu wilayah pada tahun (t-1)

DEFINISI ISTILAH ISTILAH STATISTIK

Anak Lahir Hidup

Banyaknya kelahiran hidup dari sekelompok atau beberapa kelompok wanita selama masa reproduksinya.

Anak Masih Hidup

Jumlah anak masih hidup yang dimiliki seorang wanita sampai saat wawancara dilakukan.

Angka Buta Huruf (dewasa)

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Dihitung dengan cara 100 dikurangi dengan angka melek huruf (dewasa).

Umur Harapan Hidup pada waktu lahir (e_0)

Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

Angka Kematian Balita (AKBa)

Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi).

Angka Kematian Bayi (AKB)

Jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup.

Angka Melek Huruf (dewasa)

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.

Angka Partisipasi Sekolah

Proporsi dari keseluruhan penduduk dari berbagai kelompok usia tertentu (7-12, 13-15, 16-18, dan 19-24) yang masih duduk di bangku sekolah.

Angka Putus Sekolah

Proporsi dari penduduk berusia antara 7 hingga 15 tahun yang tidak menyelesaikan sekolah dasar atau sekolah menengah tingkat pertama.

Garis Kemiskinan

Nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar kebutuhan-kebutuhan pangan yang setara dengan 2.100 kkal per kapita per hari dan nonpangan yang dibutuhkan oleh individu untuk dapat hidup secara layak.

Gross Enrollment Ratio (GER)

Jumlah pelajar yang terdaftar di suatu tingkat pendidikan, tanpa memperhatikan umur, sebagai persentase terhadap jumlah populasi usia sekolah resmi untuk tingkat pendidikan tersebut. Net enrollment ratio adalah jumlah pelajar pada kisaran usia sekolah resmi terdaftar di tingkat pendidikan tertentu sebagai persentase dari jumlah penduduk yang berada pada usia sekolah resmi untuk tingkat pendidikan tersebut. Usia sekolah resmi di Indonesia adalah 7-12 tahun untuk sekolah dasar, 13-15 tahun untuk sekolah menengah pertama, 16-18 tahun untuk sekolah menengah atas, dan 19-24 tahun untuk perguruan tinggi.

Indeks Harga Konsumen (IHK)

Indeks yang menunjukkan perbandingan relatif antara tingkat harga pada saat bulan survei dan tingkat harga pada sebelumnya, yang ditimbang dengan nilai konsumsi pada kedua bulan tersebut. IHK dihitung dengan formula Laspeyres yang dimodifikasi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks komposit yang disusun dari tiga indikator: lama hidup yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; pendidikan yang diukur

berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; dan standar hidup yang diukur dengan pengeluaran per kapita (PPP rupiah). Nilai indeks berkisar antara 0-100.

Mortalitas

Keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.

Produk Domestik Bruto (PDB)

Jumlah nilai tambah bruto (total output dari barang dan jasa) yang diproduksi oleh semua sektor ekonomi di suatu negara selama periode waktu tertentu.

Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber dayayang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Penduduk Miskin

Jumlah keseluruhan populasi dengan pengeluaran per kapita berada di bawah suatu ambang batas tertentu yang dinyatakan sebagai garis kemiskinan.

Pertumbuhan Ekonomi

Perubahan relatif nilai riil produk domestik bruto dalam suatu periode tertentu.

Purchasing Power Parity (PPP)

Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai paritas daya beli, memungkinkan dilakukannya perbandingan harga-harga riil antarprovinsi dan antarkabupaten/kota. Mengingat nilai tukar yang biasa digunakan dapat menurunkan atau menaikkan nilai daya beli yang terukur dari konsumsi per kapita yang telah disesuaikan dalam konteks PPP untuk Indonesia.

Satu rupiah di suatu provinsi memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta Selatan. PPP dihitung berdasarkan pengeluaran riil per kapita setelah disesuaikan dengan indeks harga konsumen dan penurunan kegunaan (utilitas) marginal yang dihitung dengan rumus Atkinson.

Rata rata Lama Sekolah

Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI ACEH**

Jln. Tgk. H. Daud Beureueh, No. 50, Banda Aceh, 23121
Telp. (0651) 23005 Faks. (0651) 33632
<http://aceh.bps.go.id>, email: bps1100@bps.go.id